



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

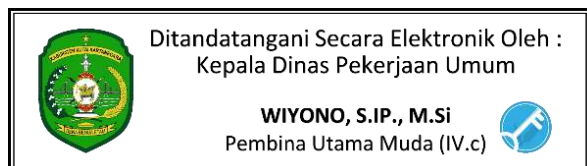
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap lembaga negara, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berisi perencanaan SKPD selama lima tahun, yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, serta disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Perencanaan strategis yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup:

1. Pernyataan strategi dan faktor-faktor keberhasilan instansi;
2. Rumusan tentang tujuan dan kebijakan;
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam program kegiatan pembangunan.

Seluruh penjabaran dalam dokumen Rencana Strategis ini telah kami susun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum secara efektif dan berkelanjutan. Akhir kata, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami berharap program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2026



DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB I	1
I.1. Latar Belakang	2
I.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
I.3. Maksud dan Tujuan	7
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
II.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
II.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	41
II.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	42
II.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah ..	45
II.1.7. <i>Kerja sama</i> daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	45
II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	46
II.2.2. Isu Strategis	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
III.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	57

III.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	67
III.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	78
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	91
IV.1. Uraian Program	92
IV.2. Uraian Kegiatan	93
IV.3. Uraian Sub kegiatan.....	94
IV.4. Sub kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	147
IV.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	153
IV.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	154
BAB V PENUTUP.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kualifikasi Pendidikan	26
Tabel II.2 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Jabatan Struktural	27
Tabel II.3 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Pangkat/Golongan	28
Tabel II.4 Rekapitulasi Aset Kantor Dinas Pekerjaan Umum	29
Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	33
Tabel II.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.....	39
Tabel II.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
Tabel II.8 Teknik Merumuskan Isu Strategis.....	52
Tabel III.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Renstra Dinas PU 2025-2029	594
Tabel III.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas PU 2025-2029	61
Tabel III.3 Analisis SWOT	68
Tabel III.4 Penahapan Renstra PD	75
Tabel III.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	85
Tabel IV.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	95
Tabel IV.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	124
Tabel IV.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	147
Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	153
Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci.....	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Stuktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	12
---	----

TAMAN KOTA RAJA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pengaturan mengenai pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 272, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi acuan dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja perangkat daerah sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur publik yang meliputi bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, serta sektor pekerjaan umum lainnya. Renstra ini menjadi instrumen penting untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang terukur, sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Sebagai bagian dari proses perencanaan yang selaras dan terpadu, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dilakukan dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2025–2029 pada tanggal 23 Juni 2025 menjadi titik awal arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, RPJMD disusun sebagai penjabaran visi, misi, serta program prioritas kepala daerah terpilih yang menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan teknis sektoral, serta memperkuat konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah.

Dalam rangka memastikan keselarasan arah pembangunan daerah, tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum

dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan partisipatif. Tahapan tersebut dilakukan dengan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Proses penyusunan dimulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan melalui Peraturan Bupati, paling lambat satu bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran strategis sebagai motor penggerak infrastruktur daerah yang menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas berperan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah melalui pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, pengendalian banjir, serta penerapan prinsip ramah lingkungan pada seluruh pembangunan fisik yang dikelola. Pembangunan, pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan infrastruktur wilayah lainnya, tetapi juga memperkuat posisi Kutai Kartanegara sebagai wilayah-mitra strategis menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum memperhatikan penerapan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/ GEDSI*). Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa layanan infrastruktur yang direncanakan, dibangun, dan dikelola memberikan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok miskin, serta kelompok rentan lainnya. Dengan demikian, Renstra ini dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih adil, aman, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Dengan demikian,

pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856);
3. Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
 10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, sungai/dan atau anak sungai yang seluruh tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan
 11. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor ...); dan
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 51).
27. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi Nomor BK 0401-Kd/1003 di Jakarta Tertanggal 20 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dasar penetapan arah kebijakan dan pedoman umum dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan Pekerjaan Umum dalam kurun waktu lima tahun, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja, permasalahan, dan isu strategis Urusan Pekerjaan Umum.
2. Mengoperasionalkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan secara terukur dan sistematis.
3. Menetapkan program, kegiatan, dan sub-kegiatan disertai dengan indikasi pagu anggaran serta target indikator kinerja yang direncanakan untuk dicapai selama periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.
4. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
5. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Menjadi acuan dalam proses evaluasi dan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdapat 2 subbab yang dibahas yaitu subbab gambaran pelayanan yang berisi tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, dan kelompok sasaran perangkat daerah. Subbab selanjutnya berisi tentang permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta strategi serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini disajikan uraian mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang direncanakan. Selain itu, bab ini juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diharapkan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan disusun melalui lima pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang proses pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, di mana rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang disampaikan dalam tahapan kampanye. Pendekatan teknokratik dilakukan menggunakan metode ilmiah dan analisis rasional oleh perangkat daerah yang berwenang. Pendekatan partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka menjaring aspirasi serta membangun rasa memiliki terhadap rencana pembangunan. Sementara itu, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diterapkan melalui proses koordinasi antar jenjang pemerintahan, untuk memastikan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional.

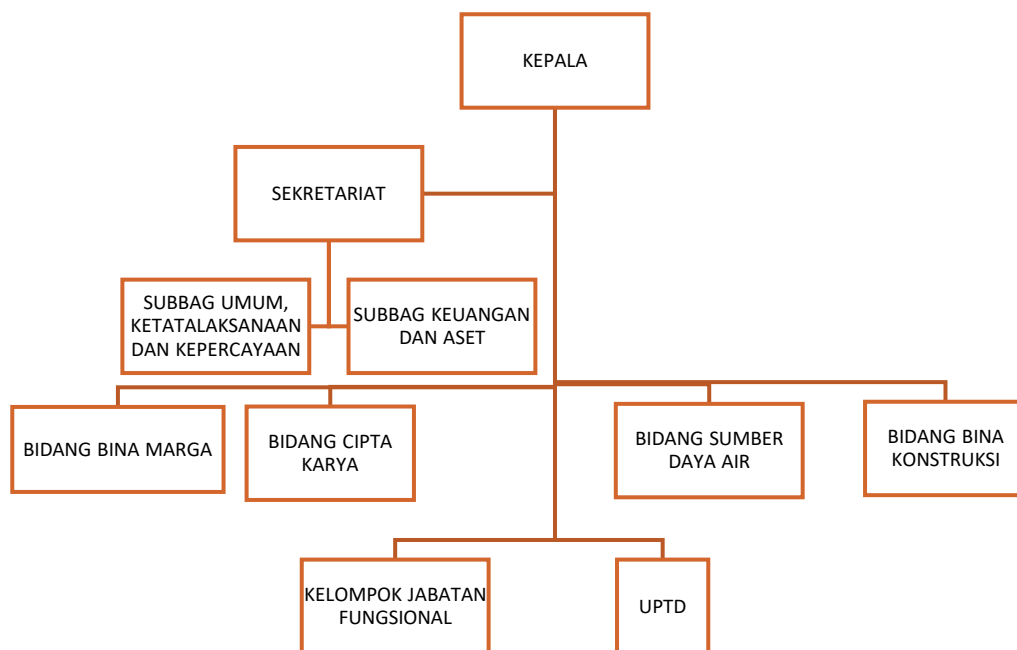
II.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, bahwa Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;

2. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang pekerjaan umum;
3. Pelaksanaan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi di bidang pekerjaan umum;
4. Penyusunan laporan di bidang pekerjaan umum;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keciptakarya;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina konstruksi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan uraian mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, maka kegiatan dalam bidang pekerjaan umum akan dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air, bidang bina konstruksi, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana, dan UPTD. Adapun struktur bagan organisasi sebagaimana yang digambarkan pada gambar berikut.



Tabel II.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No.51 Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas : mengkoordinasikan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

- a) Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang pekerjaan umum;
- b) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang pekerjaan umum;
- c) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang pekerjaan umum;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi di bidang pekerjaan umum;

- e) Mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang pekerjaan umum;
- f) Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- g) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas : Menyajikan data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset.

b. Fungsi

- a) Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) Mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- e) Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
- 1) administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 2) pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 3) penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 4) pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 5) administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 6) perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 7) administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 8) administrasi keuangan perangkat daerah; dan
 - 9) administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g) Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- h) Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

A. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Tugas : Menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

b. Fungsi

- a) melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- b) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian
- c) melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Pengukuran Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e) merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi sub kegiatan:
 - 1) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 2) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan

- penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
- 3) fasilitasi kunjungan tamu;
 - 4) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
 - 5) penatausahaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah;
 - 6) dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Perangkat Daerah;
 - 7) pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - 8) pengadaan alat besar, alat angkutan darat tak bermotor, mebel, peralatan dan mesin lainnya;
 - 9) pengadaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
 - 10) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 11) penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 12) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor;
 - 13) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional/lapangan;
 - 14) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar, serta alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;
 - 15) penyediaan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
 - 16) penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, serta tanah;
 - 17) peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;

- 18) pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - 19) pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami, penghargaan, pemberian sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian;
 - 20) koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
 - 21) *monitoring*, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
 - 22) pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
 - 23) pemindahan tugas pns;
 - 24) pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- f) melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g) menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - h) memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
 - i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.
 - j) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi.

B. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Tugas : menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi urusan keuangan dan aset.

b. Fungsi

- a) melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan keuangan dan aset;
- b) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan keuangan dan aset;
- c) menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur urusan keuangan dan aset;
- d) menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Rekonsiliasi dan Laporan Aset, Laporan penyelenggaraan SPIP, Laporan Pajak Bulanan dan Tahunan, serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e) merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi sub kegiatan:
 - 1) penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah Perangkat Daerah;
 - 2) pengamanan barang milik Daerah Perangkat Daerah;
 - 3) koordinasi dan penilaian barang milik Daerah Perangkat Daerah;
 - 4) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 5) rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 6) penatausahaan barang milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 7) pemanfaatan barang milik Daerah Perangkat Daerah;
 - 8) penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - 9) penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 - 10) pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Perangkat Daerah;

- 11) koordinasi dan pelaksanaan akuntansi satuan kerja Perangkat Daerah;
 - 12) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah, serta laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Perangkat Daerah;
 - 13) pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - 14) penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - 15) perencanaan pengelolaan retribusi Daerah;
 - 16) analisa dan pengembangan retribusi Daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi Daerah;
 - 17) penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi Daerah;
 - 18) pendataan dan pendaftaran objek retribusi Daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran);
 - 19) pengolahan data retribusi Daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran);
 - 20) penetapan wajib retribusi Daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran); dan
 - 21) pelaporan pengelolaan retribusi Daerah
- f) melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan keuangan dan aset yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g) menyusun laporan urusan keuangan dan aset;
 - h) memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
 - i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas : menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Pembangunan dan Penggantian Jembatan, serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

b. Fungsi

- a) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Pembangunan dan Penggantian Jembatan, serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b) mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Pembangunan dan Penggantian Jembatan, serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Pembangunan dan Penggantian Jembatan, serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e) mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Bina Marga yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;

- g) mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Pembangunan dan Penggantian Jembatan, serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

4. Bidang Cipta karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Tugas : menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Penataan Bangunan Gedung.
- b. Fungsi
 - a) Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Penataan Bangunan Gedung;
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Penataan Bangunan Gedung;
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d) mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Penataan Bangunan Gedung;
- e) mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Cipta Karya (menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip);
- g) mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Penataan Bangunan Gedung;
- h) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bidang Sumber daya air

Bidang Sumber daya air dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber daya air yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Tugas : Menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Pengelolaan Sumber daya air, Irigasi, serta Pemeliharaan Sumber daya air dan Irigasi.
- b. Fungsi
 - a) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Pengelolaan Sumber daya air, Irigasi, serta Pemeliharaan Sumber daya air dan Irigasi;

- b) mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pengelolaan Sumber daya air, Irigasi, serta Pemeliharaan Sumber daya air dan Irigasi;
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Pengelolaan Sumber daya air, Irigasi, serta Pemeliharaan Sumber daya air dan Irigasi;
- e) mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasannya dibawah 1000 Ha Daerah kabupaten/kota.
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Sumber Daya Air yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;

- e) mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Penerbitan Izin Usaha Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil); dan
 - 4) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Bina Konstruksi yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g) mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Pengaturan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Jasa Konstruksi;
- h) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- b. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- c. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Dinas.

- e. Sistem dan Mekanisme Kerja kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Dinas mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

8. UPTD

UPTD dipimpin oleh kepala UPTD dan ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai mencerminkan komitmen untuk memberikan layanan publik yang optimal dan profesional. Dengan tenaga kerja yang kompeten dan terlatih, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien dalam bidang pembangunan infrastruktur. Berikut adalah gambaran sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas:

Tabel II.2 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kualifikasi Pendidikan

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Laki-laki	Perempuan	TOTAL
1	SD	-	1	1
2	SLTP	-	-	0
3	SLTA	94	54	148
4	D1	-	-	-
5	DII	-	-	-
6	DIII	2	3	5
7	S1	104	45	149
8	S2	12	4	16
9	S3	-	-	-
TOTAL		212	107	319

Sumber: Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data Tabel II.2, mayoritas pegawai berpendidikan SLTA sebanyak 148 orang dan S1 sebanyak 149 orang, sementara lulusan S2 hanya 16 orang dan sisanya tersebar di jenjang pendidikan lebih rendah dengan minimnya lulusan vokasi (DIII) dan tidak adanya lulusan S3. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya tingkat pendidikan tinggi di lingkungan instansi yang dipengaruhi oleh faktor akses pendidikan, pola rekrutmen, dan minimnya pengembangan kapasitas berkelanjutan. Dampaknya berpotensi menghambat peningkatan profesionalitas serta kapasitas teknis kelembagaan, khususnya dalam mendukung program pembangunan yang menuntut keahlian spesifik. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan strategi pengembangan sumber daya manusia melalui fasilitasi pendidikan lanjut, pelatihan teknis, dan pengembangan kompetensi fungsional yang lebih terstruktur. Selain itu, kesenjangan gender dalam komposisi pendidikan juga perlu menjadi perhatian melalui kebijakan afirmatif yang mendukung peningkatan partisipasi perempuan, baik dalam pendidikan tinggi maupun pengembangan karier.

Tabel II.3 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Jabatan Struktural

No.	PEJABAT STRUKTURAL	Laki-laki	Perempuan	TOTAL
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	1	-	1
3	Eselon III/b	3	1	4
4	Eselon IV/a	3	-	3
5	JF	14	2	16
6	PELAKSANA	107	187	294
TOTAL		129	190	319

Sumber: Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan Tabel II.3, dari total 319 pegawai, hanya 9 orang yang menduduki jabatan struktural, terdiri dari *Eselon* II/b sebanyak 1 orang, *Eselon* III sebanyak 5 orang, dan *Eselon* IV sebanyak 3 orang, dengan dominasi laki-laki, sedangkan jabatan fungsional mendominasi sebanyak 294

orang. Komposisi ini menunjukkan struktur organisasi masih sangat bertumpu pada tenaga pelaksana (JF) dengan keterbatasan proporsi pejabat pengelola dan pelaksana teknis fungsional yang dipengaruhi oleh pola kebutuhan jabatan, keterbatasan formasi, dan belum optimalnya pengembangan karier fungsional. Dampaknya dapat berimplikasi pada rendahnya efektivitas koordinasi struktural dan kualitas pelaksanaan tugas teknis sehingga perlu dilakukan penataan struktur jabatan yang lebih proporsional, optimalisasi pengisian jabatan fungsional, serta peningkatan kompetensi pejabat pengelola agar mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh.

Tabel II.4 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Pangkat/Golongan

No.	PANGKAT/GOLONGAN	Laki-laki	Perempuan	TOTAL
1	Juru Muda (I-a)	-	-	-
2	Juru Muda Tk.I (I-b)	-	-	-
3	Juru (I-c)	-	-	-
4	Juru Tk.I (I-d)	-	1	1
5	Pengatur Muda (II-a)	2	-	2
6	Pengatur Muda Tk.I (II-b)	1	1	2
7	Pengatur (II-c)	17	13	30
8	Pengatur Tk.I (II-d)	64	43	107
9	Penata Muda (III-a)	45	20	65
10	Penata Muda Tk.I (III-b)	9	4	13
11	Penata (III-c)	17	8	25
12	Penata Tk.I (III-d)	41	23	64
13	Pembina (IV-a)	7	1	8
14	Pembina Tingkat I (IV-b)	1	-	1
15	Pembina Utama Muda (IV-c)	1	-	1
TOTAL		205	114	319

Sumber: Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan Tabel II.4, mayoritas pegawai berada pada golongan II dan III, yaitu golongan Pengatur (II-c dan II-d) sebanyak 137 orang dan Penata (III-

a sampai III-d) sebanyak 167 orang, sementara golongan IV hanya terisi oleh 10 orang dan golongan I hanya 1 orang. Kondisi ini menunjukkan konsentrasi pegawai masih berada pada level pengatur dan penata, dengan sedikitnya pegawai di golongan pembina (IV) yang biasanya menempati posisi strategis atau spesialisasi tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor regenerasi pegawai, pola mutasi dan promosi, serta minimnya pengembangan *karier* ke jenjang lebih tinggi. Dampaknya berpotensi membatasi ketersediaan SDM dengan kapasitas kepemimpinan senior sehingga perlu strategi akselerasi pengembangan *karier*, pembinaan kompetensi, dan pemberdayaan pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi secara optimal.

II.1.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang memadai mencerminkan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dalam menyediakan akses layanan yang merata dan sesuai standar. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif dalam bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugasnya, antara lain:

Tabel II.5 Rekapitulasi Aset Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Bangunan Gedung	1	1	0
2	PC	707	194	513
3	Lap Top	265	112	153
4	Printer (Peralatan <i>Personal Computer</i>)	248	128	120
5	Scanner (Peralatan <i>Personal Computer</i>)	40	20	20
6	Televisi	63	28	35

No	Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
7	TV Monitor	13	13	0
8	A.C. Sentral	43	43	0
9	<i>A.C. Window</i>	16	16	0
10	<i>A.C. Split</i>	182	50	132
11	Mesin Fotokopi Folio	7	7	0
12	Lemari Es	14	11	3
13	<i>Drone</i>	6	6	0
14	Meja Kerja Besi/Metal	267	126	141
15	Meja Kerja Kayu	50	50	0
16	Meja Rapat	55	55	0
17	Meja Resepsionis	1	1	0
18	Meja Komputer	10	10	0
19	Meja Kerja Pejabat <i>Eselon III</i>	3	3	0
20	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	46	46	0
21	Meja Kerja Pejabat lain-lain	29	29	0
22	Meja Tamu Biasa	5	5	0
23	Sofa	38	38	0
24	Kursi Besi/Metal	43	43	0
25	Kursi Rapat	19	19	0
26	Kursi Tamu	224	224	0
27	Kursi Biasa	100	90	10
28	Kursi Lipat	200	200	0
29	Kursi Kerja Pejabat <i>Eselon III</i>	3	3	0
30	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	209	209	0
31	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat <i>Eselon III</i>	4	4	0
32	Rak Server	1	1	0
33	Rak Besi	275	275	0
34	Rak Kayu	24	24	0
35	<i>Filing Cabinet Besi</i>	135	135	0
36	Lemari Kaca	30	30	0
37	<i>Sound System</i>	8	8	0

No	Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
38	<i>Amplifier</i>	1	1	0
39	<i>Loudspeaker</i>	3	3	0
40	<i>CCTV - Camera Control Television System</i>	51	51	0
41	Kendaraan Dinas (Mobil)	14	9	5
42	Kendaraan Dinas (Motor)	18	13	5
43	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	423	0	423

Sumber: Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Tabel II.5 Rekapitulasi Aset Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Aset	Nilai (Rp)
1	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.922.948.084.105,50
2	Gedung dan Bangunan	1.652.028.231.332,43
3	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.324.064.281.271,39
4	Tanah	501.193.283.926,46
5	Aset Tetap Lainnya	328.792.112.268,00
6	Aset lainnya	112.242.777.858,33
7	Peralatan dan Mesin	56.921.217.363,60
Total Nilai Aset		15.898.189.988.125,70

Sumber: LKPD, 2023

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, total nilai aset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai Rp 15.898.189.988.125,70, dengan komposisi terbesar berasal dari aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp 11,92 triliun (74,97%) serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1,65 triliun (10,39%). Selain itu, terdapat aset berupa Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp 1,32 triliun, Tanah Rp 501 miliar, Aset Tetap Lainnya Rp 328 miliar, Aset Lainnya Rp 112 miliar, serta Peralatan dan Mesin senilai Rp 56,9 miliar. Besarnya proporsi aset fisik mencerminkan peran strategis Dinas Pekerjaan Umum

dalam pengelolaan aset infrastruktur daerah, namun juga menuntut pengelolaan yang efektif dan pemeliharaan berkelanjutan guna menjaga kualitas layanan publik dan keberlanjutan fungsi infrastruktur daerah.

II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, diperlukan mekanisme perencanaan yang selaras dengan potensi dan kondisi wilayah. Oleh karena itu, dalam merumuskan arahan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, diperlukan analisis terhadap kondisi internal kinerja pelayanan dinas. Analisis ini menjadi dasar untuk mengetahui capaian yang telah diraih serta permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pekerjaan umum. Hasil analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 disajikan sebagai berikut.

Tabel II.6 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Indikator Tujuan dan Sasaran																			
1	Persentase Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	62,20	62,20	64,59	66,99	69,38	71,77	62,20	62,20	62,20	67,00	71,88	NA	100,00	100,00	96,30	100,01	100,00	
3	Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	0,38	0,39	0,40	0,42	0,43	0,46	0,38	0,151	0,277	0,302	0,33	NA	100,00	0,00	160,00	71,43	88,37	
Indikator Kinerja Kunci																			
4	Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	70,5	73,5	64,73	65,73	70,5	65,98	45,81	61,49	65,5	63,20	64,117	NA	n/a	87,22	89,12	97,64	100,00	
5	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,64	100,00	100,00	100,00	NA	n/a	98,64	100,00	100,00	100,00	

Secara umum, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan variasi antara indikator yang relatif tercapai dengan baik dan indikator yang masih jauh di bawah target. Pada indikator kemantapan jalan kabupaten/kota, meskipun terdapat tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2023, capaian tahun 2024 mengalami penurunan kemantapan jalan menjadi 63,2%, penurunan ini diakibatkan adanya perubahan SK Ruas Jalan Kabupaten Nomor 8 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Bupati. Dimana beberapa ruas jalan kabupaten dilakukan pemutakhiran terhadap panjang jalan, fungsi jalan, sehingga terdapat perbedaan jumlah ruas jalan kabupaten dan panjang jalan kabupaten yang ditetapkan tahun 2016 melalui Surat Keputusan Nomor 321/SK-BUP/HK/2016. Sementara itu, indikator rasio kepatuhan IMB relatif konsisten dan stabil, dengan capaian mendekati atau sesuai target (mencapai 100% pada beberapa tahun). Hal ini mencerminkan perbaikan tata kelola perizinan bangunan.

Pada aspek pengendalian banjir dan abrasi pantai, kinerja terlihat fluktuatif. Misalnya, rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi menunjukkan tingkat capaian yang melonjak sangat tinggi pada tahun 2023 (267,05%), sementara pada tahun-tahun lain 0. Pola serupa terjadi pada rasio luas kawasan permukiman rawan abrasi pantai, yang pada 2023 juga melampaui target. Kondisi ini menunjukkan adanya program intervensi besar di tahun 2023. Pada tahun 2024 realisasi kedua indikator tersebut 0, sebab tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten melainkan kewenangan BWS.

Indikator rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan perkembangan kinerja yang cukup signifikan sepanjang periode 2022–2026. Target Renstra ditetapkan sebesar 78 persen pada tahun 2023 dan 80 persen pada tahun 2024. Realisasi capaian pada tahun 2023 mencapai 64,09 persen dengan rasio capaian sebesar 82,17 persen, sementara pada tahun 2024 realisasi meningkat menjadi 70,11 persen atau 105,31 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut memberikan dua gambaran penting. Pertama, meskipun target tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja belum sepenuhnya mampu memenuhi target yang direncanakan. Namun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan

tren perbaikan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Kedua, pada tahun 2024 terjadi capaian yang hampir mencapai target, mengindikasikan adanya percepatan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi di akhir periode Renstra.

Perbedaan antara target dan realisasi ini menegaskan bahwa penetapan target pada tahun 2023 cenderung lebih optimistis dibandingkan dengan kemampuan implementasi program di lapangan. Sebaliknya, target tahun 2024 relatif konservatif sehingga capaian aktual berhasil mendekati target. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam perumusan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar lebih realistis, terukur, dan sejalan dengan kapasitas program serta sumber daya yang tersedia. Terakhir, indikator rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi cenderung tinggi dan stabil, meskipun sempat menurun pada 2024 (60%). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum aspek keselamatan kerja sudah cukup baik, namun tetap perlu pengawasan berkelanjutan agar tidak terjadi penurunan kualitas di tahun-tahun mendatang.

Penurunan capaian indikator pada Bidang Sumber daya air terjadi karena sebagian kegiatan pengendalian banjir dan pengaman pantai yang menjadi dasar perhitungan indikator tersebut secara regulatif merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak dapat diakui sebagai capaian kinerja, menurut hasil *review* Inspektorat; kondisi ini menyebabkan perhitungan capaian harus menggunakan rumus 0/1 sebagaimana ketentuan validasi kinerja, sehingga nilai realisasi menjadi 0 meskipun perangkat daerah telah melaksanakan aktivitas di lapangan. Situasi ini mengindikasikan adanya kendala struktural dalam penetapan indikator yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kewenangan faktual perangkat daerah, serta menunjukkan perlunya penyesuaian indikator, penegasan porsi kewenangan, dan penguatan koordinasi dengan BBWS agar capaian kinerja dapat dihitung secara sah dan mencerminkan kontribusi nyata perangkat daerah.

Penurunan Indikator Kunci pada Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi pada target

Renstra dikarenakan pada saat penyusunan Renstra 2021 s.d. 2025 kami menggunakan data dari laporan OPD Disnakertrans yaitu sebagai berikut :

Tabel II.7 Data Tenaga Operator Kab. Kutai Kartanegara

No	Indikator	Data Dalam Angka (orang)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Data <i>Survei</i> Tenaga Operator dan Teknis/Analis di Kab. Kutai Kartanegara	21.321	22.615	23.939	25.307	26.640

Sumber: Laporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara

Sedangkan di tahun 2024 dari Bidang Bina Konstruksi telah melakukan perhitungan *Training Need Assessment (TNA)* terkait jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada tahun anggaran tersebut dan dari hasil laporan tersebut didapat data untuk jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi khususnya untuk tenaga terampil jenjang 1 s.d. jenjang 6 adalah 17.528 pekerja untuk T.A 2024 pada kegiatan di OPD Dinas Pekerjaan Umum.

Sehingga hal tersebut berpengaruh dalam perhitungan Indikator Kinerja Kunci pada Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang memiliki sertifikat Kompetensi untuk tahun 2024. Sedangkan untuk Indikator Kunci Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi target dalam 5 tahun adalah 100% tanpa kecelakaan konstruksi, sehingga jika dalam tahun anggaran berjalan terdapat kecelakaan konstruksi maka realisasi indikator kunci tersebut akan mengalami penurunan dari target Renstra OPD tersebut.

Tabel II.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (dalam juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (dalam juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	68.747,08	98.376,27	388.725,91	268.211,50	47.644,66	59.831,30	77.968,03	362.042,19	207.594,54	N/A	87,03	79,25	93,14	77,40	N/A	40,54%	36,48%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	128.218,88	205.630,75	325.980,26	166.011,25	45.312,17	91.033,75	131.200,14	261.519,00	115.547,53	N/A	71	63,8	80,23	69,60	N/A	6,67%	6,14%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	14.035,01	33.923,88	100.360,57	64.700,00	48.750,00	12.142,71	14.286,82	87.359,17	53.133,41	N/A	86,52	42,11	87,05	82,12	N/A	46,53%	44,63%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.713,13	24.020,30	53.737,85	11.195,46	20.993,50	5.836,74	12.578,63	44.818,97	4.680,37	N/A	66,99	52,37	83,4	41,81	N/A	6,47%	-5,37%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (dalam juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (dalam juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100.613,93	494.922,93	760.212,92	273.345,85	136.699,44	86.424,37	429.395,47	655.188,13	193.766,88	N/A	85,9	86,76	86,18	70,89	N/A	28,38%	22,37%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	464.689,27	872.811,77	1.562.334,12	948.647,79	408.616,26	397.128,42	647.672,77	1.410.246,00	743.193,39	N/A	85,46	74,21	90,27	78,34	N/A	19,53%	16,96%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.698,30	2.770,00	1.600,00	3.699,68	4.165,00	1.684,81	1.816,67	1.108,97	560,98	N/A	62,44	65,58	69,31	15,16	N/A	8,21%	-24,04%

Keterangan: *N/A : Nilai NA pada indikator menunjukkan data sedang dalam proses verifikasi dan pengolahan

Kinerja pelayanan perangkat daerah dalam rangka pencapaian Renstra selama periode 2021–2023 menunjukkan capaian yang bervariasi baik dari sisi anggaran maupun indikator hasil. Beberapa program seperti Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya serta Program Pengelolaan Sumber daya air (SDA) mencatatkan pertumbuhan anggaran dan realisasi yang signifikan, dengan rasio realisasi anggaran tahunan yang relatif tinggi, menandakan efektivitas pelaksanaan yang baik. Di sisi lain, terdapat penurunan kinerja pada program seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi, serta penurunan rasio efektivitas belanja. Dari sisi capaian indikator, sebagian besar target kinerja berhasil dipenuhi, terutama pada sektor infrastruktur jalan dan layanan administrasi, dengan banyak indikator mencapai 100% target. Secara umum, meskipun terdapat tantangan pada efektivitas anggaran di beberapa program, kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan arah yang positif dengan tingkat akuntabilitas pelaporan dan capaian indikator yang cukup baik dalam mendukung target strategis daerah.

Untuk Kinerja Program Pengembangan Jasa konstruksi dalam tahun anggaran 2022 s.d. 2024 (rata-rata) adalah sebesar $\pm 65,77\%$ dikarenakan beberapa kendala dalam penyelenggaraan Program tersebut, antara lain :

1. Untuk Bidang yang menyelenggarakan Program tersebut adalah Bidang Bina Konstruksi dan Bidang Tersebut baru terbentuk pada tahun 2023.
2. Untuk Jumlah SDM di Bidang tersebut terlalu besar tetapi tidak diimbangi dengan kuantitas SDM di Bidang tersebut.
3. Pada TA 2022 – 2023 masih meraba dalam penyusunan RKA terkait kegiatan yang membidangi jasa konstruksi.
4. Pada TA 2024 dilakukan studi tiru ke OPD di beberapa kabupaten/kota juga provinsi terkait Tupoksi OPD yang membidangi jasa konstruksi, sehingga masih banyak anggaran kami yang belum terserap.

II.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan kepada kelompok sasaran yang spesifik sesuai dengan masing-masing bidang urusan:

- Bidang Bina Marga: Masyarakat umum sebagai pengguna infrastruktur jalan dan jembatan, pelaku usaha transportasi, serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten.
- Bidang Cipta Karya: Masyarakat penerima manfaat dari fasilitas bangunan gedung dan lingkungan, serta pengelola kawasan strategis.
- Bidang Sumber daya air: Kelompok petani pengguna jaringan irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air, masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir atau genangan, komunitas peduli lingkungan perairan, serta pelaku pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti sistem drainase dan bangunan pengaman pantai.
- Bidang Bina Konstruksi: Penyedia jasa konstruksi (Kontraktor Pelaksana, Konsultan dan Sub Kontraktor), tenaga kerja konstruksi (terampil maupun ahli), asosiasi dan lembaga usaha jasa konstruksi, pelaku usaha, pemasok material dan alat berat, Sekolah dan universitas yang memiliki jurusan jasa konstruksi serta seluruh masyarakat yang bergerak dibidang jasa konstruksi baik yang membutuhkan layanan pelatihan dan sertifikasi TKK, informasi jasa konstruksi, Sosialisasi/Bimtek/FGD serta pengawasan dan pengendalian terhadap tertib usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat dilakukan secara parsial. Pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan kebutuhan sektor lain agar pelayanan publik lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, Dinas PU menjalin hubungan kerja dan kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan infrastruktur. Bentuk

kemitraan baik dengan perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun di luar daerah, antara lain:

1. Bappeda – dukungan terhadap perencanaan makro dan mikro berkaitan dengan infrastruktur serta koordinasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor agar program Dinas PU selaras dengan prioritas daerah, termasuk dalam mendukung pengembangan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan strategis lainnya.
2. BPKAD – dukungan terhadap pengelolaan, pencatatan dan pemanfaatan aset infrastruktur
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan – penyediaan infrastruktur jalan, drainase, serta jaringan utilitas pada kawasan industri, sentra IKM, dan pasar rakyat guna memperlancar arus barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja – terkait kolaborasi terhadap Program Kukar Siap Kerja
5. Dinas Perhubungan – koordinasi pembangunan sarana transportasi pendukung, seperti terminal, jembatan timbang, serta peningkatan konektivitas menuju pelabuhan dan bandara.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman – sinergi dalam pembangunan prasarana dasar permukiman, termasuk jalan lingkungan, sistem drainase, dan infrastruktur pengendali banjir di kawasan padat penduduk.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan – kerja sama terkait pengelolaan lingkungan dalam setiap proyek infrastruktur, termasuk pengendalian limbah konstruksi, perlindungan daerah resapan air, serta rehabilitasi kawasan pasca pembangunan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) – kolaborasi penyediaan infrastruktur mitigasi bencana, seperti tanggul, kanal pengendali banjir, serta akses jalan evakuasi.
9. Dinas Pertanian dan Peternakan – dukungan penyediaan sarana irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur perikanan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
10. Dinas Perikanan – dukungan penyediaan sarana irigasi tambak

PU berperan sebagai penyedia prasarana dasar yang bersifat *enabler*, sehingga setiap OPD mitra dapat lebih optimal dalam melaksanakan program kerjanya. Misalnya, dukungan Dinas PU pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui pembangunan akses jalan kawasan industri akan berdampak langsung pada peningkatan investasi, distribusi barang, dan daya saing ekonomi. Begitu pula dengan dukungan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan melalui pembangunan jalan inspeksi, irigasi primer, irigasi sekunder dan saluran pembuang yang meningkatkan produktivitas pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kolaborasi lintas OPD juga berperan penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan kebencanaan. Sinergi Dinas PU dengan DLHK serta BPBD memungkinkan terciptanya sistem pengendalian banjir yang terpadu, rehabilitasi ekosistem, dan penyediaan infrastruktur tangguh bencana. Dengan demikian, kemitraan antar-OPD tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membangun ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

II.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berperan dalam memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, khususnya dalam penyediaan sarana pendukung operasional. Melalui kerja sama dengan PT. Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE) dalam penyewaan alat berat, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dapat berlangsung lebih efisien serta mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.

II.1.7. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan dalam rangka peningkatan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperlancar aksesibilitas dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur antar kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan faktor utama yang harus dianalisis untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Bagian ini menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dan pelayanan bidang infrastruktur wilayah.

II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan tantangan multidimensi yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun Masalah pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada belum optimalnya pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah kewenangan. Konektivitas antar wilayah masih belum merata, terutama di daerah perdesaan dan kawasan perbatasan, akibat keterbatasan kualitas serta kemantapan jalan dan jembatan. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur menyebabkan pengelolaan belum efisien dan kurang berbasis data. Selain itu, tata kelola infrastruktur belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kebutuhan wilayah, sementara kolaborasi antar pihak masih lemah.

Tingkat kemantapan jalan pada tahun 2024 sebesar 63,20 persen menunjukkan kondisi yang belum ideal. Keterbatasan anggaran, distribusi alat berat yang belum merata, serta pemeliharaan rutin yang belum optimal memperburuk situasi tersebut. Selain itu, beberapa capaian kinerja lain juga menunjukkan ketidaktercapaian yang signifikan. Indeks Layanan Infrastruktur Sumber daya air hanya berada pada kisaran 0,3, jauh di bawah target tahunan. Rasio kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir serta kawasan permukiman sepanjang pantai yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai masih sangat rendah, dengan realisasi 0–16 persen dalam tiga tahun terakhir, jauh dari target tahunan yang meningkat setiap tahun. Capaian layanan irigasi juga belum optimal, di mana realisasi baru mencapai 43–70 persen, masih di bawah target 76–85 persen. Di sisi lain, ketersediaan tenaga operator, teknisi,

dan analisis bersertifikat juga sangat terbatas, dengan realisasi hanya sekitar 2–3 persen dari target di atas 13 persen.

Keseluruhan capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia teknis menjadi isu strategis utama. Demikian pula, pengelolaan aset bangunan pemerintah masih menghadapi kendala dalam pendataan, pemanfaatan, dan perawatan, sehingga menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar serta peningkatan kapasitas kelembagaan perlu diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi sejumlah tantangan yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan dasar. Permasalahan yang muncul umumnya berkaitan dengan keterbatasan kondisi geografis, faktor teknis, serta aspek kelembagaan yang memerlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan.

1. Banyaknya kondisi jalan yang rusak dan belum memenuhi standar (kondisi tidak mantap)

Sebagian besar jaringan jalan kabupaten masih dalam kondisi belum mantap sehingga menurunkan kelancaran mobilitas barang dan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan bahan material yang sesuai standar teknis serta lemahnya pengawasan terhadap beban muatan kendaraan yang melintas di atas kapasitas jalan. Di samping itu, kegiatan pemeliharaan infrastruktur sering kali tidak responsif dan belum dilaksanakan secara terjadwal, sementara pemanfaatan ruang milik jalan belum sesuai ketentuan. Berdasarkan data tahun terakhir, kondisi jalan mantap di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 63,20 persen dari total panjang jalan 2.196,94 kilometer, menunjukkan masih banyak ruas yang memerlukan peningkatan kualitas.

2. Belum optimalnya pengelolaan bangunan negara

Pengelolaan bangunan milik pemerintah daerah masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi kualitas dan keterpakaian aset.

Selain lemahnya sistem pendataan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan, terdapat sejumlah faktor struktural yang memperburuk kondisi tersebut. Pertama, penganggaran untuk bangunan gedung pemerintah belum optimal, terutama terkait penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP yang terus berlarut tanpa kejelasan alokasi anggaran menyebabkan banyak bangunan tidak dapat berfungsi, dan meningkatkan risiko kerusakan sebelum dimanfaatkan. Kedua, porsi anggaran yang besar untuk membiayai pembangunan bangunan bagi instansi vertikal mengakibatkan kemampuan pendanaan untuk bangunan perangkat daerah sendiri menjadi terbatas. Situasi ini menyebabkan sejumlah bangunan daerah tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kombinasi kedua faktor tersebut menciptakan tekanan fiskal yang menghambat penyelesaian bangunan strategis dan menurunkan kualitas layanan publik yang bergantung pada ketersediaan infrastruktur gedung yang layak.

3. Terdapat Kawasan permukiman dengan potensi banjir yang cukup tinggi
Banjir menjadi salah satu persoalan yang cukup sering terjadi di wilayah permukiman, terutama di daerah dengan sistem drainase yang belum terintegrasi. Tingginya sedimentasi sungai turut memperparah genangan, sementara operasi dan pemeliharaan saluran drainase belum berjalan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, perubahan tata guna lahan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman tanpa perencanaan yang matang turut menurunkan daya dukung lingkungan dan meningkatkan risiko banjir di sejumlah kecamatan.
4. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
Sistem irigasi yang berfungsi untuk menunjang ketahanan pangan daerah belum sepenuhnya dikembangkan dan dikelola secara efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya jalan inspeksi yang berperan penting sebagai akses untuk kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. Keterbatasan pengelolaan secara terpadu juga mengakibatkan rendahnya efektivitas sistem dalam mendukung produktivitas lahan pertanian.
5. Rendahnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi
Tenaga kerja konstruksi memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas dan keselamatan pembangunan infrastruktur. Namun, hingga saat ini

jumlah tenaga kerja bersertifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara masih terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja, serta rendahnya minat dan kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi. Akibatnya, pelaksanaan pekerjaan konstruksi belum sepenuhnya didukung oleh tenaga profesional yang memenuhi standar keahlian dan keselamatan kerja.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, seperti kerusakan infrastruktur, keterbatasan sarana pengendali banjir, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta belum optimalnya tata kelola jasa konstruksi, menjadi hambatan utama dalam mendukung pembangunan wilayah secara merata. Kondisi ini berdampak langsung pada pencapaian visi Kepala Daerah terpilih, “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik”, yang menekankan pada terwujudnya daerah yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong tercapainya kualitas pelayanan publik dan konektivitas wilayah yang berkelanjutan.

Tabel II.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan infrastruktur daerah yang menjangkau seluruh wilayah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum	Banyaknya kondisi jalan yang rusak dan belum memenuhi standar (kondisi tidak mantap)	Beberapa kondisi dengan geografis tertentu yang memerlukan biaya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi
		Kondisi geologi yang membutuhkan penanganan khusus
		Keterbatasan dan kelangkaan bahan material alam yang sesuai standar
		Kelebihan muatan dan lemahnya pengawasan jalan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pemeliharaan infrastruktur kurang responsif
		Pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) belum memenuhi standar
		Kondisi jalan mantap di kabupaten masih minim sebesar 63,2% dari jumlah total panjang jalan kabupaten 2.196,94 Km
	Belum optimalnya pengelolaan bangunan negara	Belum optimalnya penganggaran bangunan gedung untuk penyelesaian bangunan Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)
		Besarnya anggaran pembiayaan bangunan instansi vertikal sehingga menyebabkan bangunan belum dapat digunakan/dipakai
	Terdapat kawasan permukiman dengan potensi banjir yang cukup tinggi	Tingginya sedimentasi sungai
		Sistem drainase yang belum terintegrasi
		Kurangnya operasi dan pemeliharaan drainase
		Alih fungsi lahan pertanian
	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Minimnya jalan inspeksi sebagai akses peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pada beberapa lokasi pekerjaan untuk membangun irigasi tidak tersedia akses yang memadai untuk dilewati peralatan dan material
	Rendahnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi	Lemahnya kapasitas SDM dan kompetensi tenaga kerja konstruksi
		Rendahnya minat dan kesempatan sertifikasi tenaga kerja

Sumber: hasil analisis, 2025

II.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan bidang urusan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Hasil identifikasi dan analisis atas berbagai permasalahan pelayanan yang dihadapi, serta mempertimbangkan dinamika eksternal seperti arah kebijakan nasional, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan perkembangan tren global, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan sejumlah isu strategis utama. Isu-isu ini merepresentasikan tantangan dan peluang paling mendasar yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, dan bina konstruksi selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Seluruh isu tersebut menjadi pijakan penting dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan infrastruktur daerah, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.10 Teknik Merumuskan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUKAR	
Komitmen tinggi Pemda dalam pembangunan pemerataan Infrastruktur daerah	Banyaknya kondisi jalan yang rusak dan belum memenuhi standar (kondisi tidak mantap)	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM	Geopolitik dan Geoekonomi	Peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar (jalan nasional, pelabuhan, logistik, SPAM)	- Keterbatasan infrastruktur dasar, belum meratanya pusat pertumbuhan baru, dukungan konektivitas untuk IKN - Pemerataan Pembangunan Wilayah - Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi	- Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar
	Belum optimalnya pengelolaan bangunan negara						
Dukungan pengembangan kawasan rawan bencana melalui	Terdapat kawasan permukiman dengan potensi	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Akselerasi pencapaian Agenda 2030	Kawasan Strategis <i>National Heart</i>	Penguatan ketangguhan	Penguatan Ketahanan Pangan Dalam	Pelestarian lingkungan hidup

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUKAR	
kolaborasi pusat-daerah dan partisipasi masyarakat	banjir yang cukup tinggi	(Banjir, Tanah Longsor)	(SDGs), khususnya tujuan infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan iklim	<i>of Borneo</i> (pengendalian banjir, karhutla, restorasi gambut & mangrove)	daerah rawan bencana	Mendukung Swasembada Pangan Nasional	berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana
	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi						
Kolaborasi dengan swasta (CSR), penguatan peran masyarakat, dan sinergi lintas sektor	Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi	Peningkatan Kesempatan Kerja	Komitmen global kolaborasi multipihak (multi- <i>stakeholder partnership</i>)	Penguatan peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan lingkungan	Rendahnya sinergi antar sektor, perlunya kolaborasi daerah-IKN-swasta-masyarakat	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif	Optimalisasi pengelolaan SDM Jasa Konstruksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pelayanan infrastruktur, dinamika kebijakan nasional, serta perubahan lingkungan strategis di tingkat global dan regional, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengidentifikasi tiga isu strategis utama. Ketiga isu ini merepresentasikan tantangan sekaligus peluang yang harus direspons secara tepat dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan inklusif sesuai dengan arah pembangunan daerah tahun 2025–2029.

1. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Konektivitas antar wilayah di Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan besar, terutama pada wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang belum memiliki akses jalan memadai. Banyak jalan kabupaten dalam kondisi rusak, belum beraspal, atau tidak mantap. Konektivitas infrastruktur yang belum optimal ini menghambat distribusi logistik, mobilitas penduduk, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar menjadi isu strategis utama, khususnya-dalam menyambut peluang ekonomi baru akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berbatasan langsung dengan wilayah Kutai Kartanegara.

2. Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah dengan karakter topografi yang beragam, termasuk kawasan rawan banjir dan genangan yang sering terdampak pada musim hujan. Di sisi lain, sebagian jaringan irigasi mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan saluran, sedimentasi, serta terbatasnya kegiatan pemeliharaan rutin. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya produktivitas lahan pertanian dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah. Dinas Pekerjaan Umum berperan strategis dalam mendukung pengendalian banjir dan pengelolaan jaringan irigasi melalui pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan infrastruktur sumber daya air. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan dan penguatan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan penataan ruang, serta pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan, menjadi isu strategis yang penting untuk diwujudkan. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana, menjaga keberlanjutan produksi pertanian, dan mendukung pengelolaan sumber daya air yang adaptif terhadap perubahan iklim.

3. Optimalisasi pengelolaan SDM Jasa Konstruksi

Pengelolaan sumber daya manusia jasa konstruksi menjadi faktor kunci dalam menjamin mutu, keselamatan, dan ketepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan dalam hal dominasi tenaga kerja konstruksi pada level operator, terbatasnya jumlah tenaga bersertifikat, serta rendahnya kompetensi teknis di lapangan. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya penerapan standar teknis, efisiensi waktu, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu, pengelolaan tenaga kerja belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi yang efektif. Optimalisasi pengelolaan SDM jasa konstruksi perlu diarahkan pada penguatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, peningkatan tata kelola dan basis data tenaga kerja konstruksi, serta pembinaan berkelanjutan oleh Dinas Pekerjaan Umum bekerja sama dengan lembaga sertifikasi dan asosiasi profesi. Dengan langkah ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih efisien, profesional, dan sesuai dengan standar mutu nasional, sekaligus memperkuat peran Dinas PU sebagai pembina utama sektor konstruksi daerah.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

III.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam konteks penyusunan rencana strategis pembangunan daerah, perumusan tujuan menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan arah dan konsistensi pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun mendatang. Tujuan tersebut merupakan bentuk konkret dari penjabaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029, serta menjadi pijakan dalam merumuskan sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi teknis dan strategis di bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran penting dalam mewujudkan infrastruktur dasar yang andal, pelayanan publik yang berkualitas, serta mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan mandat kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, tetapi juga diarahkan untuk mendukung misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah KUKAR IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan yang dijabarkan dalam 17 Program Dedikasi. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian Misi 2 yaitu “Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai fondasi ekonomi baru non ekstraktif”, Misi 3 yaitu “Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;”, dan Misi 5, yaitu “Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan”, dijabarkan ke dalam sasaran “Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah” dengan Program Dedikasi, Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera, Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh, Program Stimulus Komunitas Kreatif, dan Program Pelayanan Publik Cerdas. Program-program ini diarahkan untuk

memperkuat aksesibilitas, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar di seluruh kecamatan dan desa. Hal ini dapat dilihat dalam keterkaitan program prioritas dengan beberapa program unggulan KDH yaitu Program Penyelenggaraan Jalan (Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera), Program Pengelolaan Sumber daya air (Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera dan Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh), Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (Program Stimulus Komunitas Kreatif), Program Penataan Bangunan Gedung (Program Pelayanan Publik Cerdas)

Dukungan ini diwujudkan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sistem air minum, dan sarana perdesaan lainnya yang menjadi tulang punggung konektivitas wilayah. Peran Dinas PU tidak hanya berfungsi sebagai penyedia infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai penguat fondasi pemerataan pembangunan agar setiap wilayah memiliki akses setara terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Dengan demikian, keterlibatan Dinas PU dalam mendukung Misi 5 menunjukkan kontribusi strategis dalam mewujudkan pembangunan Kukar yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat visi daerah “Terbaik untuk Masyarakat Kutai Kartanegara”.

Dinas Pekerjaan Umum mendukung pencapaian Tujuan 1 RPJMD yakni Meningkatkan fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita. Lebih khusus, mendukung Sasaran 1.3 Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah, dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.

Dengan berpedoman pada tugas dan fungsi serta NSPK bidang pekerjaan umum serta memperhatikan keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD maka disusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tujuan dan sasaran Renstra memperhatikan isu strategis pelayanan dinas. Adapun tujuan dan indikator tujuan Renstra disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Renstra Dinas PU 2025-2029

Tujuan	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	62,44	65,06	67,77	70,48	73,12	75,76

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan maksud untuk memastikan bahwa sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara secara khusus berkontribusi pada Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas wilayah, serta penyediaan prasarana pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Kerangka tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan memberikan kontribusi strategis terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal.

Tujuan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan yaitu “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar” dengan indikator kinerja berupa Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI). Indikator ini menjadi tolok ukur utama dalam mengukur keberhasilan penyediaan layanan infrastruktur dasar selama periode lima tahun ke depan. Tujuan ini akan dicapai secara bertahap dengan menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat sehingga tidak ada terpinggirkan. Selanjutnya, tujuan ini diturunkan dalam sasaran, program, dan kegiatan yang dirancang secara sistematis dalam dokumen Rencana Strategis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan organisasi yang bersifat lebih operasional, terukur, serta dapat langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan. Dalam dokumen Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sejumlah sasaran pembangunan yang disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumusan sasaran dilakukan sebagai respons terhadap permasalahan aktual dan isu strategis di bidang penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, yang meliputi pengelolaan jalan dan jembatan, sumber daya air, penataan bangunan, serta infrastruktur dasar lainnya. Sasaran ini mencerminkan arah prioritas pembangunan infrastruktur yang ingin dicapai secara bertahap dalam lima tahun mendatang, baik dari sisi peningkatan kualitas layanan publik, penguatan kapasitas penyelenggaraan infrastruktur, maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Setiap sasaran dirumuskan untuk memperkuat pencapaian tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum secara lebih konkret dan terukur. Sasaran-sasaran tersebut juga disusun agar dapat dievaluasi melalui indikator-indikator kinerja utama yang relevan, sehingga menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan yang terintegrasi, efektif, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel III.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas PU 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NSPK: – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi – Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; – Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	62,44	65,06	67,77	70,48	73,12	75,76	
		Meningkatnya Kemantapan jalan kabupaten	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Bina Marga	32,91	34,16	35,46	36,76	38,06	39,36	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi; -Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah										

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinsi, Kabupaten, dan Kota – Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan – Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi – Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan										

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sistem Drainase Perkotaan – Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi – Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara – Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan										

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Konstruksi Berkelanjutan										
Sasaran RPJMD: meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah		Meningkatnya kondisi bangunan negara dalam kondisi baik	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Keciptakarya	13,48	13,94	14,41	14,89	15,36	15,84	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Sumber daya air	11,34	12	12,68	13,37	13,99	14,61	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan	Indeks Kualitas Layanan	4,71	4,97	5,22	5,46	5,71	5,96	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pengawasan jasa konstruksi	Infrastruktur (IKLI) Bina Konstruksi							

Sumber: Hasil Analisis, 2025

III.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah di bidang pekerjaan umum. Strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan peran strategis perangkat daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar yang andal, merata, dan berkelanjutan, serta dalam rangka mendukung visi pembangunan daerah. Perumusan strategi dilakukan berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, khususnya bidang bina marga, sumber daya air, penataan bangunan dan lingkungan, serta tata ruang. Melalui strategi yang tepat dan berbasis kondisi riil, Dinas Pekerjaan Umum diharapkan mampu merespons dinamika pembangunan, memanfaatkan peluang eksternal, serta mengatasi berbagai kendala struktural dalam penyediaan layanan infrastruktur kepada masyarakat.

Tabel III.3 Analisis SWOT

	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
	Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan infrastruktur yang merata, sesuai dengan visi “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik”	Masih banyak jalan kabupaten dalam kondisi rusak atau tidak mantap, terutama di daerah pinggiran dan pelosok
	Ketersediaan data teknis infrastruktur seperti SK Jalan Kabupaten, inventaris aset bangunan gedung, serta peta wilayah rawan banjir	Keterbatasan dalam pemanfaatan dan integrasi data teknis infrastruktur menyebabkan perencanaan dan pengambilan keputusan belum optimal
	Adanya SDM teknis dan perangkat kerja di Dinas PU yang relatif memadai untuk mengelola program pembangunan fisik	Proporsi tenaga kerja konstruksi yang didominasi oleh level jabatan 1-3 (operator), dengan 448 dari 601 orang hanya memiliki kompetensi pada level tersebut, menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan dan penerapan standar teknis di lapangan belum optimal

		<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
		Kewenangan penuh pada pengelolaan jalan kabupaten, bangunan gedung daerah, dan sistem drainase perkotaan	Keterbatasan anggaran serta Keterbatasan dalam pengelolaan irigasi, tumpang tindih lahan, serta keterbatasan material yang menghambat optimalisasi pembangunan infrastruktur
<i>Opportunity</i>	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berbatasan langsung memberikan peluang sinergi pembangunan infrastruktur dasar yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong infrastruktur hijau dan layanan dasar yang inklusif sesuai SDGs 2030.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur daerah dengan proyek IKN untuk memanfaatkan sinergi regional dan percepatan pembangunan jalan dan drainase	Menyesuaikan rencana pembangunan infrastruktur untuk menyambut IKN dengan fokus pada perbaikan jalan di daerah pinggiran dan pelosok
	Teknologi infrastruktur semakin maju, seperti pemanfaatan GIS untuk pengelolaan irigasi	Memfaatkan dukungan kebijakan nasional dan teknologi GIS untuk penguatan perencanaan infrastruktur	Mengoptimalkan pemanfaatan data teknis yang ada dengan memanfaatkan teknologi GIS dan sistem informasi canggih, sehingga

		<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
		berbasis data dan pengelolaan infrastruktur irigasi	keterbatasan integrasi data tidak menghambat perencanaan dan pengambilan keputusan
	Adanya program Kementerian PUPR dalam peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.	Mengoptimalkan kapasitas SDM Dinas PU dan data teknis infrastruktur dalam merancang proyek hijau dan inklusif sesuai SDGs 2030	Mempercepat peningkatan kapasitas dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR, Balai Jasa Konstruksi, dan lembaga pelatihan kerja, untuk mendukung kualitas pembangunan infrastruktur sesuai standar nasional
	Skema pendanaan alternatif seperti KPBU, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan CSR sektor industri lokal	Mengakses pendanaan alternatif seperti KPBU dan CSR dengan proposal berbasis data dan kajian teknis yang sudah tersedia	Mengatasi keterbatasan anggaran, pengelolaan irigasi, dan material melalui skema pembiayaan alternatif (KPBU, DAK, CSR) yang mendukung optimalisasi pembangunan infrastruktur

		<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
<i>Threat</i>	Ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama di wilayah hulu dan perbatasan kabupaten	Memanfaatkan kapasitas kelembagaan Dinas PU untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan mengembangkan infrastruktur dasar secara merata.	Menyusun rencana jangka menengah untuk rehabilitasi jalan rusak di daerah terpencil, dengan pengelolaan berbasis prioritas risiko bencana dan konektivitas wilayah
	Perubahan iklim meningkatkan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor	Menggunakan data teknis dan kapasitas pengelolaan jalan yang sudah tersedia untuk merancang infrastruktur tahan bencana banjir dan longsor	Memperkuat sistem pengelolaan data teknis infrastruktur dan integrasinya agar perencanaan pembangunan dapat lebih responsif terhadap risiko bencana, sehingga dampak banjir dan longsor dapat diminimalkan
	Dominasi tenaga kerja konstruksi pada level operator dengan jumlah teknisi dan analis yang terbatas menyebabkan pelaksanaan proyek konstruksi kurang optimal	Mengoptimalkan SDM teknis yang ada dan perangkat kerja yang memadai untuk memberikan pelatihan yang lebih intens kepada tenaga kerja level operator, sehingga potensi hambatan	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui program sertifikasi, pelatihan teknis, dan pengembangan karier untuk operator agar dapat memenuhi standar teknis yang diperlukan

		<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
		mutu dan percepatan proyek konstruksi dapat diminimalkan	
	Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan ketergantungan pada pembiayaan APBD berpotensi menghambat pengendalian tata ruang, drainase, serta realisasi program strategis saat terjadi <i>refocusing</i> anggaran	Memanfaatkan kewenangan penuh dalam pengelolaan jalan, bangunan, dan drainase untuk menerapkan kebijakan pengendalian tata ruang dan pengaturan lahan	Mengurangi keterbatasan anggaran, material, dan pengelolaan irigasi melalui skema pembiayaan alternatif dan koordinasi tata ruang agar program strategis tetap terlaksana

Strategi 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan agar sesuai dengan umur rencana

Strategi ini diarahkan untuk menjawab isu strategis terkait peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar, khususnya pada wilayah pedesaan dan terpencil yang masih mengalami keterbatasan akses. Berdasarkan analisis SWOT, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekuatan dalam bentuk kewenangan penuh atas pengelolaan jalan kabupaten serta ketersediaan data teknis kondisi jalan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan menerapkan prinsip infrastruktur yang aman, nyaman, dan aksesibel, serta ramah bagi pejalan kaki, perempuan, dan difabel. Dinas PU akan menerapkan pendekatan *green infrastructure*, terutama pada pembangunan jaringan jalan dan jembatan di wilayah pesisir yang bersinggungan dengan wilayah pesisir dan mangrove. Dengan memanfaatkan peluang hadirnya dukungan pemerintah pusat dan investasi terkait pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), peningkatan kualitas jalan yang memenuhi standar teknis dan umur rencana menjadi prioritas dalam menjamin konektivitas antar wilayah, kelancaran logistik, serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Strategi 2: Mengoptimalkan pemanfaatan data teknis infrastruktur berbasis teknologi digital

Strategi ini ditujukan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data dan teknologi, sejalan dengan tuntutan tata kelola pembangunan yang modern dan adaptif. Data terpilah gender, usia, disabilitas, dan status sosial akan dimanfaatkan untuk memastikan siapa yang menerima manfaat pembangunan, dan siapa yang masih tertinggal. Berdasarkan analisis SWOT, Dinas Pekerjaan Umum memiliki kekuatan berupa ketersediaan data teknis infrastruktur seperti SK Jalan Kabupaten, peta wilayah rawan banjir, dan inventaris aset bangunan gedung. Namun, pemanfaatan dan integrasi data tersebut masih terbatas sehingga belum mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Dengan adanya peluang pemanfaatan teknologi seperti *Geographic Information System (GIS)* serta dukungan transformasi digital pemerintah, strategi ini diarahkan untuk membangun sistem informasi infrastruktur yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses guna mendukung perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Strategi 3: Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi

Strategi ini difokuskan untuk menjawab tantangan rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi, yang didominasi oleh jabatan level operator dengan keterbatasan kemampuan teknis dan manajerial. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kekuatan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum berupa SDM teknis dan perangkat kerja yang memadai perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan sertifikasi sesuai standar nasional. Peluang ini semakin besar dengan adanya dukungan program Kementerian PUPR dan Balai Jasa Konstruksi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja. Melalui strategi ini, tenaga kerja konstruksi diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, menjamin mutu infrastruktur, serta mempercepat penyelesaian proyek pembangunan secara efisien dan berkelanjutan.

Strategi 4: Mengoptimalkan data terpadu berbasis GIS dan pemetaan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten Kutai Kartanegara

Strategi ini merespons isu strategis pengelolaan aset irigasi dalam mendukung sektor pertanian dalam mencapai ketahanan pangan dengan peningkatan infrastruktur irigasi. Dalam SWOT, terdapat peluang pemanfaatan teknologi informasi (seperti GIS) dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengelolaan aset irigasi menuju irigasi semi-teknis bahkan irigasi teknis pada daerah-daerah irigasi yang memiliki potensi besar yakni yang memiliki ketersediaan sumber air, petani maupun akses yang memadai. Strategi ini diarahkan untuk mendukung dalam mencapai program ketahanan pangan dan meningkatkan penghidupan para petani. Upaya peningkatan jaringan irigasi diprioritaskan pada kawasan prioritas pertanian sehingga pembangunan infrastruktur irigasi tersebut dapat selaras dengan arah pembangunan sektor pertanian. Lebih lanjut, strategi ini juga merupakan bagian dari upaya mendorong perencanaan pertanian berbasis kawasan dan adaptasi perubahan kondisi geografis serta budaya masyarakat, sehingga infrastruktur irigasi tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga meningkatkan penghidupan petani.

Strategi 5: Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungan

Strategi ini merespons kendala nyata dalam pengelolaan bangunan gedung negara, terutama terkait ketidakcukupkannya alokasi anggaran,

penumpukan KDP yang belum terselesaikan, serta besarnya porsi pembiayaan yang dialihkan untuk bangunan instansi vertikal. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah bangunan pelayanan publik belum berfungsi optimal, dan menurunkan kualitas lingkungan bangunan akibat kurangnya pemeliharaan dan keterlambatan penyelesaian konstruksi. Dalam konteks tata kelola aset, kelemahan ini memperlebar kesenjangan antara kebutuhan layanan dan kapasitas infrastruktur *existing*. Strategi ini diarahkan untuk memastikan bangunan gedung negara memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan aksesibilitas universal melalui penyelesaian prioritas KDP, optimalisasi pemanfaatan anggaran, dan penataan lingkungan bangunan yang ramah bagi kelompok rentan. Upaya peningkatan kualitas bangunan diprioritaskan pada efisiensi desain, audit kelayakan struktural, serta penanganan lingkungan berbasis mitigasi risiko sehingga bangunan yang terbangun tidak hanya layak fungsi tetapi berkelanjutan.

Strategi pembangunan di bidang pekerjaan umum yang telah diuraikan di atas akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan dilakukan secara bertahap. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas PU dapat disajikan seperti pada Tabel III.4.

Tabel III.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah	Peningkatan infrastruktur wilayah	Pengembangan infrastruktur wilayah	Pemerataan infrastruktur wilayah	Pemantapan infrastruktur wilayah yang mendukung transformasi dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK
Pemetaan kondisi jalan kabupaten dan penyusunan	Peningkatan ruas jalan perdesaan dan	Peningkatan kualitas jalan sesuai standar teknis dan	Optimalisasi konektivitas jalan kabupaten	Jalan kabupaten mantap dan berstandar

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
rencana teknis di wilayah pedesaan dan terpencil.	perbatasan guna pemerataan aksesibilitas dasar.	umur rencana dan integrasi dengan jaringan logistik regional.	sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan kawasan IKN.	nasional dan konektivitas antar wilayah merata dan berkelanjutan.
Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan sistem informasi infrastruktur daerah, termasuk pemetaan kebutuhan data teknis dan integrasi antar unit kerja	Pembangunan dan uji coba sistem informasi infrastruktur berbasis digital (GIS dan SIM Infrastruktur) yang mengintegrasikan data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, termasuk penerapan <i>dashboard monitoring</i> proyek infrastruktur	Integrasi sistem informasi dengan platform digital kabupaten dan sistem nasional untuk memastikan konsistensi data dan interoperabilitas lintas sektor.	Pemantapan pemanfaatan sistem informasi digital secara penuh sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan perencanaan pembangunan.
Pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan identifikasi jumlah tenaga kerja berdasarkan	Pelaksanaan program pelatihan dasar dan sertifikasi bagi tenaga operator dan teknisi lapangan bekerja sama dengan Balai Jasa	Peningkatan kapasitas tenaga ahli dan pengawas proyek melalui pelatihan teknis lanjutan, serta penerapan sistem evaluasi kinerja berbasis kompetensi.	Penguatan manajemen mutu pekerjaan konstruksi dengan penerapan standar teknis dan prosedur keselamatan kerja (K3).	Pemantapan sistem pengelolaan SDM konstruksi berbasis kompetensi dan kinerja.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
kualifikasi dan bidang keahlian	Konstruksi dan Kementerian PU			
Penyusunan data terpadu berbasis GIS dan pemetaan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten Kutai Kartanegara	Peningkatan jaringan irigasi pada kawasan prioritas pertanian	Pengembangan jaringan irigasi menuju irigasi semi-teknis.	Pengembangan jaringan irigasi menuju irigasi teknis.	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan irigasi .
Pemetaan kondisi bangunan, identifikasi KDP, dan kebutuhan rehabilitasi dan aksesibilitas.	Penyelesaian KDP prioritas dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pembangunan/rehabilitasi bangunan.	Audit kelayakan struktural, rehabilitasi teknis, dan peningkatan kualitas lingkungan bangunan.	Integrasi data bangunan ke sistem informasi aset dan standarisasi bangunan pelayanan publik.	Pemantapan sistem pemeliharaan rutin, aksesibilitas universal penuh, dan pengelolaan siklus hidup bangunan.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penahapan strategi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026–2030 disusun secara selaras dengan kerangka *core* penahapan pembangunan dalam RPJMD. Strategi dan penahapan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026–2030 telah disusun secara terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan infrastruktur wilayah yang andal, berkelanjutan, dan mendukung transformasi pembangunan menuju Kukar Idaman Terbaik.

Setiap strategi merepresentasikan tanggapan terhadap isu strategis utama, mulai dari peningkatan kualitas jalan, optimalisasi data teknis berbasis digital, penguatan kapasitas tenaga kerja konstruksi, hingga pengelolaan drainase dan daerah aliran sungai yang adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui tahapan pembangunan yang terstruktur dari fondasi hingga pemantapan, arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum diharapkan mampu memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan efisiensi tata kelola infrastruktur, serta memastikan keberlanjutan layanan publik yang berkeadilan dan berdaya saing.

III.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan bentuk operasionalisasi dari strategi yang telah ditetapkan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman normatif dan teknokratis dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Seluruh arah kebijakan tersebut disusun secara selaras dengan strategi guna memastikan keterpaduan pelaksanaan pembangunan sektoral.

1. Untuk melaksanakan Strategi Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan agar Sesuai dengan Umur Rencana, ditetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut:
 - a.** Penerapan Standar dan Pengawasan Kualitas Jalan, meningkatkan kualitas pembangunan jalan melalui penerapan standar teknis konstruksi yang tepat guna, termasuk pemilihan material yang sesuai spesifikasi dan kondisi geografis lokal. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pengawasan mutu secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, guna memastikan infrastruktur jalan memiliki daya tahan optimal dan umur layanan sesuai dengan rencana teknis. Arah kebijakan ini mendukung pengurangan beban biaya pemeliharaan jangka panjang dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
 - b.** Penguatan jaringan jalan kabupaten dan peningkatan kapasitas konektivitas antar wilayah strategis penyangga IKN dan pemerataan pembangunan ekonomi, arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan kapasitas jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi pendukung yang menghubungkan wilayah Kutai

pembangunan wilayah sekitar IKN yang memerlukan data mutakhir dan terstandar.

- b.** Pengembangan Infrastruktur Terpadu untuk Mendukung Kawasan Strategis IKN, implementasi infrastruktur terintegrasi difokuskan pada pengembangan kawasan strategis yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan penting bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur agar setiap elemen, seperti jalan, drainase, sanitasi, dan utilitas lainnya, saling mendukung secara fungsional. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pembangunan, mempercepat pertumbuhan kawasan prioritas, serta mewujudkan tata ruang wilayah yang produktif dan berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan jangka menengah daerah. Pelaksanaan kebijakan ini juga diperkuat melalui pemanfaatan data teknis infrastruktur dan sistem informasi geografis berbasis teknologi digital, guna mendukung perencanaan terpadu, sinkronisasi lintas sektor, dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
3. Untuk melaksanakan Strategi Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi, ditetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut:
 - a.** Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk mendukung kualitas infrastruktur daerah, diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor konstruksi melalui peningkatan keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi, serta fasilitasi sertifikasi tenaga kerja sesuai standar nasional. Arah kebijakan ini juga mencakup pembinaan terhadap tenaga ahli dan teknisi di bidang konstruksi, penguatan kemitraan dengan lembaga pelatihan dan asosiasi profesi, serta penyusunan pedoman pelaksanaan teknis yang mendukung profesionalisme dan keselamatan kerja. Dengan langkah ini, tenaga kerja konstruksi daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur berkualitas tinggi, berdaya saing, dan sesuai dengan ketentuan teknis serta standar keselamatan yang berlaku.
 - b.** Pembinaan Tenaga Kerja konstruksi untuk mendukung kualitas infrastruktur daerah, diarahkan pada penguatan pembinaan berkelanjutan bagi tenaga kerja konstruksi agar memiliki etos kerja,

pemahaman teknis, dan kepatuhan terhadap standar pelaksanaan konstruksi. Arah kebijakan mencakup kegiatan pendampingan, sosialisasi regulasi jasa konstruksi, serta peningkatan pemahaman terhadap standar mutu, keselamatan, dan kesehatan kerja. Pembinaan juga dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, lembaga pelatihan, dan asosiasi profesi guna memastikan tenaga kerja konstruksi daerah mampu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan pembinaan yang terarah, diharapkan kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah dapat terjaga secara konsisten dan berkelanjutan.

- c.** Pembinaan Badan Usaha Konstruksi untuk mendukung kualitas infrastruktur daerah, difokuskan pada peningkatan kapasitas dan tata kelola Badan Usaha Konstruksi agar mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan meliputi pembinaan administrasi usaha, peningkatan pemahaman terhadap standar teknis dan kontraktual, serta fasilitasi pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi. Selain itu, pembinaan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen, penerapan sistem mutu, serta kepatuhan terhadap aspek keselamatan dan lingkungan. Melalui pembinaan ini, Badan Usaha Konstruksi diharapkan dapat berperan optimal dalam menghasilkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berdaya saing.
- d.** Transformasi Digital Dan Penyediaan Data Serta Informasi Jasa Konstruksi, diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi yang modern, transparan, dan berbasis data melalui pemanfaatan teknologi informasi. Arah kebijakan mencakup pengembangan dan pemutakhiran sistem informasi jasa konstruksi, penyediaan data yang akurat dan terintegrasi, serta peningkatan akses terhadap informasi bagi pemangku kepentingan. Transformasi digital juga diarahkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan jasa konstruksi secara lebih efektif dan efisien. Dengan tersedianya data dan informasi yang andal, pengambilan keputusan di bidang jasa konstruksi diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan akuntabel.

- e. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendukung Tertib Usaha Jasa Konstruksi, Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi, menitikberatkan pada penguatan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan jasa konstruksi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Arah kebijakan mencakup peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Pengawasan dilakukan melalui pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan penegakan kepatuhan terhadap standar teknis, administrasi, dan keselamatan. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan tercipta tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang pada akhirnya mendukung kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah.
4. Untuk melaksanakan Strategi Mengoptimalkan pengelolaan saluran drainase dan daerah aliran sungai dengan memperhatikan aspek permukiman dan tempat usaha masyarakat, ditetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Terpadu Wilayah Sumber daya air dan Pesisir, Mendorong koordinasi lintas sektor antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah DAS dan pantai secara holistik. Arah kebijakan ini mencakup integrasi kegiatan pengendalian banjir, konservasi pesisir, dan perlindungan ekosistem dengan dokumen tata ruang dan kebijakan lingkungan hidup. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas infrastruktur pengendali banjir dan mengurangi dampak risiko bencana secara berkelanjutan.
 - b. Optimalisasi Logistik Konstruksi pada Wilayah Terpencil dan Sulit Diakses, diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengelolaan logistik pembangunan jaringan irigasi dan drainase dengan menyesuaikan kondisi geografis serta keterbatasan akses lokasi kerja. Arah kebijakan ini mencakup penyediaan alat berat yang terdistribusi secara efisien, peningkatan jalur logistik pendukung, serta kolaborasi antar instansi untuk percepatan mobilisasi material dan peralatan. Dengan demikian, pelaksanaan

pekerjaan irigasi menjadi lebih efektif dan tidak terkendala faktor lokasi.

- c.** Penguatan Sistem Drainase Berbasis Risiko Banjir, Meningkatkan kapasitas sistem drainase di pusat ekonomi melalui pendekatan berbasis manajemen risiko banjir. Kebijakan ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi seperti GIS untuk pemetaan drainase, identifikasi titik rawan genangan, serta perencanaan pembangunan drainase yang adaptif terhadap perubahan iklim. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat dan kegiatan usaha dari potensi kerugian akibat bencana hidrometeorologi.
 - d.** Peningkatan kualitas layanan irigasi yang Mendukung Ketahanan Pangan dan Pariwisata, melalui pengelolaan jaringan irigasi dan drainase yang lebih efektif, termasuk penataan daerah aliran sungai dan wilayah permukiman yang terdampak. Pemerintah daerah memperkuat fungsi penyediaan air irigasi dengan memastikan ketersediaan, kontinuitas, dan distribusi air yang sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian produktif. Kebijakan ini mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi, pemeliharaan saluran, serta peningkatan kapasitas tampungan dan aliran air. Selain itu, pemerintah daerah mengarahkan pengelolaan air untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata, terutama pada wilayah yang memerlukan pengendalian banjir, ketersediaan air baku, dan perlindungan lingkungan agar fungsi kawasan wisata tetap terjaga.
5. Untuk melaksanakan Strategi Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungan, ditetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut:
- a.** Penajaman Perencanaan Teknis, Efisiensi Biaya Konstruksi, dan Percepatan Penyelesaian Bangunan Pelayanan Publik, memperkuat kualitas penyelenggaraan pembangunan gedung pelayanan publik melalui perencanaan teknis yang lebih presisi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan layanan masyarakat. Pemerintah daerah meningkatkan ketepatan dokumen perencanaan dengan memperhatikan aspek fungsional, struktural, dan lingkungan, sehingga desain bangunan mampu menjawab kebutuhan operasional unit layanan. Upaya efisiensi biaya konstruksi dilakukan melalui optimalisasi perencanaan desain, pemilihan

material yang sesuai standar kinerja, serta pengendalian pelaksanaan konstruksi yang ketat. Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan teknologi konstruksi untuk mengurangi durasi pekerjaan dan meminimalkan potensi keterlambatan. Kebijakan ini menekankan percepatan penyelesaian pembangunan gedung pelayanan publik agar fasilitas dapat segera dimanfaatkan, sehingga mendukung peningkatan akses dan mutu layanan pemerintah kepada masyarakat.

- b.** Penerapan Standar Nasional Bangunan Gedung Pelayanan Publik, Audit Teknis, dan Penguatan Fasilitas Aksesibilitas, peningkatan kualitas bangunan gedung pelayanan publik melalui penerapan standar nasional yang mencakup keamanan, kenyamanan, dan fungsi bangunan. Pemerintah daerah melaksanakan audit teknis secara berkala untuk memastikan kondisi bangunan memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan fungsi. Kebijakan ini juga mencakup penguatan fasilitas aksesibilitas guna memastikan bangunan pelayanan publik dapat digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- c.** Penyusunan Rencana Pemeliharaan Jangka Pendek–Menengah, Digitalisasi *Monitoring* Kondisi Bangunan, dan Konsistensi Anggaran, difokuskan pada pembentukan sistem pemeliharaan bangunan pemerintah yang terencana dan berkesinambungan. Pemerintah daerah menyusun rencana pemeliharaan jangka pendek dan menengah untuk memastikan bangunan tetap berfungsi optimal serta mencegah kerusakan yang dapat meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang. Digitalisasi *monitoring* kondisi bangunan diterapkan untuk memperkuat ketepatan data, mempercepat proses pemantauan, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Kebijakan ini diikuti dengan penguatan konsistensi anggaran pemeliharaan agar keberlangsungan fungsi bangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Tabel III.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

Strategi	NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan agar Sesuai dengan Umur Rencana	1		Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke IKN	Penerapan Standar dan Pengawasan Kualitas Jalan	
	2	Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan	Penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan	Penguatan jaringan jalan kabupaten dan peningkatan kapasitas konektivitas antar wilayah strategis penyangga IKN dan pemerataan pembangunan ekonomi	
	3	Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Fungsi Jalan	Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara	Penguatan tata kelola jaringan jalan berbasis legalitas dan konektivitas antar wilayah	

Strategi	NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
Mengoptimalkan pemanfaatan data teknis infrastruktur berbasis teknologi digital	4	Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN	Pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga berbasis citra satelit	
	5	Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Strategis	- Penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara	Pengembangan Infrastruktur Terpadu untuk Mendukung Kawasan Strategis IKN	
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi	6	Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antar wilayah - Penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana	1. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk mendukung kualitas infrastruktur daerah 2. Pembinaan Tenaga Kerja konstruksi untuk	
	7	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017			

Strategi	NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		Tentang Jasa Konstruksi	- Peningkatan kualitas	mendukung kualitas infrastruktur daerah	
	8	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan	3. Pembinaan Badan Usaha Konstruksi untuk mendukung kualitas infrastruktur daerah 4. transformasi digital dan penyediaan data serta informasi jasa konstruksi	
	9	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017		5. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendukung Tertib Usaha Jasa Konstruksi, Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	

Strategi	NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		Tentang Jasa konstruksi			
	10	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota			
Mengoptimalkan pengelolaan saluran drainase dan daerah aliran sungai dengan	11	Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai		Pengelolaan Terpadu Wilayah Sumber daya air dan Pesisir	

Strategi	NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
memperhatikan aspek permukiman dan tempat usaha masyarakat	12	Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan		Optimalisasi Logistik Konstruksi pada Wilayah Terpencil dan Sulit Diakses	
	13	Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan		Penguatan Sistem Drainase Berbasis Risiko Banjir	
	14	Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi		Peningkatan kualitas layanan irigasi yang Mendukung Ketahanan Pangan dan Pariwisata	
	15	Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018		Penajaman perencanaan teknis, efisiensi biaya	

Strategi	NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungan		tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara		konstruksi, dan percepatan penyelesaian bangunan pelayanan publik	
	16	Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung		Penerapan standar nasional bangunan gedung pelayanan publik, audit teknis, dan penguatan fasilitas aksesibilitas	
	17	Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan		Penyusunan rencana pemeliharaan jangka pendek-menengah, digitalisasi <i>monitoring</i> kondisi bangunan, dan konsistensi anggaran	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1. Uraian Program

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan program dan kegiatan indikatif yang selaras dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah implementasi yang terstruktur, terukur, dan sistematis. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen ini akan menjadi dasar pelaksanaan intervensi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2025–2029 dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur, layanan pekerjaan umum, serta mendukung terciptanya lingkungan wilayah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

- a. Program Pengelolaan Sumber daya air (SDA)
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- c. Program Penataan Bangunan Gedung
- d. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- e. Program Penyelenggaraan Jalan
- f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Seluruh program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian target-target strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Rencana program dan kegiatan tersebut dirancang secara sistematis untuk memastikan adanya keterpaduan antara perencanaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya, indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci disusun secara terstruktur, yang mencerminkan capaian serta kontribusi langsung terhadap tujuan pembangunan di sektor pekerjaan umum, khususnya dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

IV.2. Uraian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan disusun secara terstruktur sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu bidang pekerjaan umum yang meliputi pengelolaan jalan, drainase, sumber daya air, penataan bangunan, dan infrastruktur permukiman. Setiap kegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik yang lebih optimal, serta mendukung konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan ini juga diorientasikan agar sejalan dengan dinamika pembangunan daerah, nasional, serta peluang strategis yang muncul dari pengembangan wilayah sekitar. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

A. Bidang Sumber daya air

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

B. Bidang Cipta Karya

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

C. Bidang Bina Marga

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

D. Bidang Bina Jasa Konstruksi

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

IV.3. Uraian Sub kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis, pelaksanaan program dan kegiatan perlu dijabarkan secara lebih operasional melalui penyusunan sub kegiatan. Sub kegiatan berperan sebagai tahapan pelaksanaan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan urusan pekerjaan umum di daerah. Setiap sub kegiatan dijabarkan secara spesifik untuk mencerminkan kontribusi nyata terhadap *outcome* dan *output* program di bidang pekerjaan umum, sekaligus memudahkan proses pemantauan, evaluasi, serta akuntabilitas publik.

Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dilakukan dengan menurunkan (*cascading*) kinerja mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Konsep ini merupakan instrumen perencanaan teknokratik yang memungkinkan kinerja yang akan dicapai merupakan respons terhadap perkembangan kondisi pembangunan serta kebutuhan masyarakat di sektor infrastruktur, pekerjaan umum, dan tata ruang wilayah. Berikut disajikan tabel teknik perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel IV.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
Sasaran RPJMD : Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya Kemantapan jalan kabupaten			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum		
					Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Bina Marga		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat		Tingkat Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya layanan jalan	Panjang Jalan Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diawasi Penyelenggaraannya	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survei Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	
				Terehabilitasinya Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rehabilitasi	Rehabilitasi Jalan	
				Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Terantau dan Terevaluasinya	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
				Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Pembangunan Jalan	
				Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Penggantian Jembatan	
				Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	
				Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jembatan	
				Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
				Terbangunnya Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jembatan	
		Meningkatnya kondisi bangunan			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Keciptakaryaan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
		negara dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas bangunan gedung		1. Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik 2. Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Meningkatnya cakupan bangunan laik fungsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dapat digunakan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
				Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				<p>Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),</p>	<p>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</p>	<p>Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan		Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Meningkatnya cakupan penataan kawasan	Jumlah Kawasan yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
				Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Tertatanya Bangunan dan Lingkungan di	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				daerah Kabupaten/Kota	dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur sumber daya air			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Sumber daya air		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi		Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abras		
			Meningkatnya kualitas layanan irigasi dalam kondisi baik		Persentase luas layanan irigasi dalam kondisi baik		
				Meningkatnya perlindungan	Persentase Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				kawasan permukiman dari banjir	yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kawasan Permukiman Rawan Abrasi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Abrasi	Luas Kawasan Permukiman Rawan Abrasi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Abrasi		
				Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Normalisasi/Restorasi Sungai	
				Terbangunnya <i>Check Dam</i>	Jumlah <i>Check Dam</i> yang Dibangun	Pembangunan <i>Check Dam</i>	
				Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Pembangunan Kanal Banjir	
				Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Peningkatan Tanggul Sungai	
				Terbangunnya <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Terehabilitasinya <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
				Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	
				Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
				Meningkatnya kualitas layanan irigasi dalam kondisi baik	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dibangun	Pembangunan Bendung Irigasi	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
				Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan		Persentase drainase dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Meningkatnya cakupan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Panjang drainase dalam baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
				Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
				Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
		Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksinya			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Bina Konstruksi		
			Meningkatn kompetensi tenaga konstruksi		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Bersertifikat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang bersertifikat	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
				Tersedianya <i>Training Need Assessment (TNA)</i> Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah <i>Training Need Assessment (TNA)</i> Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator	Penyediaan <i>Training Need Assessment (TNA)</i> Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Penyediaan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
				Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya kepatuhan badan usaha jasa konstruksi	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
				Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Pemanfaatan Produk			
				Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
				Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	

Sumber: hasil analisis, 2025

Selanjutnya, pada bagian ini akan disajikan rincian program, kegiatan serta sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara beserta capaian kinerja, indikator, target tahunan, dan pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah secara terukur, efektif, dan efisien. Penyusunan tabel ini mengacu pada pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yang menekankan keterkaitan langsung antara alokasi anggaran dengan hasil dan manfaat yang diharapkan.

Tabel IV.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				712.181.023.485,00		577.319.389.938,72		469.063.970.822,34		457.242.725.579,09		459.765.160.561,45		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				47.644.658.111,00		56.784.138.659,00		58.172.750.479,00		58.184.652.979,00		58.198.340.854,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,47	77,05	47.644.658.111,00	77,10	56.784.138.659,00	77,15	58.172.750.479,00	77,20	58.184.652.979,00	77,25	58.198.340.854,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				475.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		1	475.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		0		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		91		80		80		80		80			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	200.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				75.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		91	75.000.000,00	80	50.000.000,00	80	50.000.000,00	80	50.000.000,00	80	50.000.000,00		
1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				44.019.658.111,00		44.019.658.111,00		44.019.658.111,00		44.019.658.111,00		44.019.658.111,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.704	4.760	44.019.658.111,00	4.760	44.019.658.111,00	4.760	44.019.658.111,00	4.760	44.019.658.111,00	4.760	44.019.658.111,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	18		18		18		18		18			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				1		1		1		1			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				43.294.658.111,00		43.294.658.111,00		43.294.658.111,00		43.294.658.111,00		43.294.658.111,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.704	4.760	43.294.658.111,00	4.760	43.294.658.111,00	4.760	43.294.658.111,00	4.760	43.294.658.111,00	4.760	43.294.658.111,00		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				650.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	18	650.000.000,00	18	630.000.000,00	18	630.000.000,00	18	630.000.000,00	18	630.000.000,00		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				125.000.000,00		189.300.000,00		189.300.000,00		189.300.000,00		189.300.000,00		
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	125.000.000,00	2	189.300.000,00	2	189.300.000,00	2	189.300.000,00	2	189.300.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		4		5		5		5		5			
1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		62.890.000,00		62.890.000,00		62.890.000,00		62.890.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		4	50.000.000,00	5	62.890.000,00	5	62.890.000,00	5	62.890.000,00	5	62.890.000,00		
1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000,00		126.410.000,00		126.410.000,00		126.410.000,00		126.410.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	75.000.000,00	2	126.410.000,00	2	126.410.000,00	2	126.410.000,00	2	126.410.000,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200.000.000,00		0,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	397	200.000.000,00		0,00	397	400.000.000,00	397	400.000.000,00	397	400.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50					50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0,00		0,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00		
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	397	200.000.000,00		0,00	397	200.000.000,00	397	200.000.000,00	397	200.000.000,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				995.000.000,00		3.975.650.688,00		4.186.000.688,00		4.197.903.188,00		4.211.591.063,00		
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5	995.000.000,00	5	3.975.650.688,00	8	4.186.000.688,00	8	4.197.903.188,00	8	4.211.591.063,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		150		300		300		300		300			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		100		100		850		850		850			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		3		3		3		3		3			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				60.000.000,00		69.000.000,00		79.350.000,00		91.252.500,00		104.940.375,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		3	60.000.000,00	3	69.000.000,00	3	79.350.000,00	3	91.252.500,00	3	104.940.375,00		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000,00		1.587.504.583,00		1.787.504.583,00		1.787.504.583,00		1.787.504.583,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5	300.000.000,00	5	1.587.504.583,00	8	1.787.504.583,00	8	1.787.504.583,00	8	1.787.504.583,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000,00		404.681.250,00		404.681.250,00		404.681.250,00		404.681.250,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	200.000.000,00	3	404.681.250,00	3	404.681.250,00	3	404.681.250,00	3	404.681.250,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.000.000,00		323.991.930,00		323.991.930,00		323.991.930,00		323.991.930,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,00	4	323.991.930,00	4	323.991.930,00	4	323.991.930,00	4	323.991.930,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				235.000.000,00		738.485.000,00		738.485.000,00		738.485.000,00		738.485.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		150	235.000.000,00	300	738.485.000,00	300	738.485.000,00	300	738.485.000,00	300	738.485.000,00		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000,00		851.987.925,00		851.987.925,00		851.987.925,00		851.987.925,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		100	100.000.000,00	100	851.987.925,00	850	851.987.925,00	850	851.987.925,00	850	851.987.925,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				555.000.000,00		0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		5	555.000.000,00		0,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		11											
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				235.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		11	235.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				320.000.000,00		0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		5	320.000.000,00		0,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				900.000.000,00		6.846.268.040,00		6.846.268.040,00		6.846.268.040,00		6.846.268.040,00		
Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	900.000.000,00	5	6.846.268.040,00	5	6.846.268.040,00	5	6.846.268.040,00	5	6.846.268.040,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0		1		1		1		1			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik				400.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1	400.000.000,00	12	1.700.000.000,00	12	1.700.000.000,00	12	1.700.000.000,00	12	1.700.000.000,00		
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		146.268.040,00		146.268.040,00		146.268.040,00		146.268.040,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	0,00	1	146.268.040,00	1	146.268.040,00	1	146.268.040,00	1	146.268.040,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				500.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	500.000.000,00	5	5.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				375.000.000,00		1.378.261.820,00		1.856.523.640,00		1.856.523.640,00		1.856.523.640,00		
Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			375.000.000,00		1.378.261.820,00	20	1.856.523.640,00	20	1.856.523.640,00	20	1.856.523.640,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		22		22		22		22		22			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		22		6		6		6		6			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		3		3		3		3		3			
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		410.466.600,00		410.466.600,00		410.466.600,00		410.466.600,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		22	100.000.000,00	6	410.466.600,00	6	410.466.600,00	6	410.466.600,00	6	410.466.600,00		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				175.000.000,00		380.378.500,00		380.378.500,00		380.378.500,00		380.378.500,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		22	175.000.000,00	22	380.378.500,00	22	380.378.500,00	22	380.378.500,00	22	380.378.500,00		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		478.261.820,00		478.261.820,00		478.261.820,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0,00		0,00	20	478.261.820,00	20	478.261.820,00	20	478.261.820,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		587.416.720,00		587.416.720,00		587.416.720,00		587.416.720,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		3	100.000.000,00	3	587.416.720,00	3	587.416.720,00	3	587.416.720,00	3	587.416.720,00		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				45.312.170.934,00		60.404.727.033,61		34.276.245.143,05		30.582.333.577,86		30.548.046.404,45		
Meningkatnya layanan irigasi dalam kondisi baik	Persentase luas layanan irigasi dalam kondisi baik (%)	70,11	73,53	14.542.552.336,00	74,33	20.185.932.355,61	75,23	20.858.104.131,85	75,95	17.490.651.943,06	76,68	17.490.651.943,06	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				14.542.552.336,00		20.185.932.355,61		20.858.104.131,85		17.490.651.943,06		17.490.651.943,06		
Irigasi dalam Kondisi Baik	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)		3	14.542.552.336,00	2	20.185.932.355,61	1	20.858.104.131,85	1	17.490.651.943,06	1	17.490.651.943,06		
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)		4,00		4,00		5,00		5,00		5,00			
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)		0		1		0		0		0			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)		1,42		0,62		0,62		0,62		0,62			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)		0,58		1,17		1,17		1,17		1,17			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		1,17		3,63		4,22		3,10		3,10			
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				4.245.283.500,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)		1,42	4.245.283.500,00	0,62	1.850.000.000,00	0,62	1.850.000.000,00	0,62	1.850.000.000,00	0,62	1.850.000.000,00		
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				3.520.420.000,00		10.887.283.519,61		12.659.455.295,85		9.292.003.107,06		9.292.003.107,06		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		1,17	3.520.420.000,00	3,63	10.887.283.519,61	4,22	12.659.455.295,85	3,10	9.292.003.107,06	3,10	9.292.003.107,06		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				1.278.200.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)		0,58	1.278.200.000,00	1,17	1.750.000.000,00	1,17	1.750.000.000,00	1,17	1.750.000.000,00	1,17	1.750.000.000,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.498.648.836,00		3.498.648.836,00		3.498.648.836,00		3.498.648.836,00		3.498.648.836,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		7,00	3.498.648.836,00	7,00	3.498.648.836,00	7,00	3.498.648.836,00	7,00	3.498.648.836,00	7,00	3.498.648.836,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				1.500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)		3	1.500.000.000,00	2	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi				0,00		1.200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)		0	0,00	1	1.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)		4,00	500.000.000,00	4,00	500.000.000,00	5,00	600.000.000,00	5,00	600.000.000,00	5,00	600.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob (%)	2,82	6,94	10.830.151.617,00	8,60	10.000.000.000,00	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.769.618.598,00		40.218.794.678,00		13.418.141.011,20		13.091.681.634,80		13.057.394.461,39		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)		1,89	10.830.151.617,00	0,98	10.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				10.830.151.617,00		10.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)		1,89	10.830.151.617,00	0,98	10.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (%)	17,65	29,46	19.939.466.981,00	32,19	30.218.794.678,00	35,10	13.418.141.011,20	37,06	13.091.681.634,80	39,06	13.057.394.461,39		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.769.618.598,00		40.218.794.678,00		13.418.141.011,20		13.091.681.634,80		13.057.394.461,39		
perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)		30	19.939.466.981,00	10	30.218.794.678,00	10	13.418.141.011,20	10	13.091.681.634,80	10	13.057.394.461,39		
	Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit)				1									
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)		3		2									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)				1									
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		1		3		3		3		3			
	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		3		3		3		3		3			
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)													
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)		1											
	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)		0,01											
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)		6,76		24,16		19,96		19,41		19,32			
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		8,98		3,50									
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		29,25		2,49		2,61		2,01		2,01			
	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)				0,11									
	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)		2,25											
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir					1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)		1		1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai					2.218.367.168,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		8,98		2.218.367.168,00		3,50		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00		
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				875.201.250,00		539.444.515,00		489.626.120,00		395.266.500,00		395.266.500,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		29,25	875.201.250,00	2,49	539.444.515,00	2,61	489.626.120,00	2,01	395.266.500,00	2,01	395.266.500,00		
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.100.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		1	1.100.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				2.820.408.163,00		10.079.350.163,00		8.328.514.891,20		8.096.415.134,80		8.062.127.961,39		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)		6,76	2.820.408.163,00	24,16	10.079.350.163,00	19,96	8.328.514.891,20	19,41	8.096.415.134,80	19,32	8.062.127.961,39		
1.03.02.2.01.0103 - Peningkatan Tanggul Sungai				1.050.490.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)		2,25	1.050.490.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.02.2.01.0104 - Pembangunan Check Dam				0,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit)			0,00	1	1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.02.2.01.0113 - Pembangunan Kanal Banjir				3.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)		0,01	3.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai				0,00		3.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)			0,00	0,11	3.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				5.875.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		
Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)		30	5.875.000.000,00	10	3.500.000.000,00	10	3.500.000.000,00	10	3.500.000.000,00	10	3.500.000.000,00		
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				0,00		10.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)			0,00	1	10.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				1.500.000.000,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)		3	1.500.000.000,00	2	1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				48.750.000.000,00		34.287.629.312,55		37.789.117.464,50		26.856.903.962,80		27.805.869.377,44		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	0	6,93	48.750.000.000,00	4,88	34.287.629.312,55	5,38	37.789.117.464,50	3,82	26.856.903.962,80	3,96	27.805.869.377,44	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				48.750.000.000,00		34.287.629.312,55		37.789.117.464,50		26.856.903.962,80		27.805.869.377,44		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sistem drainase perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	0	3	48.750.000.000,00	2	34.287.629.312,55	3	37.789.117.464,50	2	26.856.903.962,80	2	27.805.869.377,44		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	4		2		2		2		2			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	6		8		8		8		8			
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				43.000.000.000,00		30.787.629.312,55		34.289.117.464,50		23.356.903.962,80		24.305.869.377,44		
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	0	3	43.000.000.000,00	2	30.787.629.312,55	3	34.289.117.464,50	2	23.356.903.962,80	2	24.305.869.377,44		
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				5.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	4	5.000.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.500.000.000,00		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	6	750.000.000,00	8	1.000.000.000,00	8	1.000.000.000,00	8	1.000.000.000,00	8	1.000.000.000,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				20.993.501.200,00		17.206.732.072,72		14.167.969.809,09		13.836.136.969,90		13.906.735.723,23		
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik (%)	61,29	62,37	20.293.501.200,00	62,90	16.506.732.072,72	63,44	13.467.969.809,09	63,98	13.136.136.969,90	64,52	13.206.735.723,23	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				20.993.501.200,00		17.206.732.072,72		14.167.969.809,09		13.836.136.969,90		13.906.735.723,23		
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	3	3	19.993.501.200,00	3	16.206.732.072,72	3	13.167.969.809,09	3	12.836.136.969,90	3	12.906.735.723,23		
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				19.993.501.200,00		16.206.732.072,72		13.167.969.809,09		12.836.136.969,90		12.906.735.723,23		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	3	3	19.993.501.200,00	3	16.206.732.072,72	3	13.167.969.809,09	3	12.836.136.969,90	3	12.906.735.723,23		
Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	0	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00		
1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	0	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00		
Terpenuhinya kepatuhan masyarakat terhadap PBG dan SLF di kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten (%)	100	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00		
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				20.993.501.200,00		17.206.732.072,72		14.167.969.809,09		13.836.136.969,90		13.906.735.723,23		
Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	100	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	100	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				136.699.437.240,00		46.951.851.182,85		24.835.220.574,01		30.208.519.523,83		29.653.979.070,89		
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata (%)	69,75	71	136.699.437.240,00	71,38	46.951.851.182,85	71,75	24.835.220.574,01	72,13	30.208.519.523,83	72,5	29.653.979.070,89	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				136.699.437.240,00		46.951.851.182,85		24.835.220.574,01		30.208.519.523,83		29.653.979.070,89		
Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	24,14	23,61	136.699.437.240,00	27,78	46.951.851.182,85	30,56	24.835.220.574,01	34,72	30.208.519.523,83	38,89	29.653.979.070,89		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				136.699.437.240,00		46.951.851.182,85		24.835.220.574,01		30.208.519.523,83		29.653.979.070,89		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	24,14	23,61	136.699.437.240,00	27,78	46.951.851.182,85	30,56	24.835.220.574,01	34,72	30.208.519.523,83	38,89	29.653.979.070,89		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				408.616.256.000,00		358.585.837.242,82		297.347.741.600,15		295.029.455.551,37		297.096.821.873,47		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	63,198	65,981	408.616.256.000,00	66,484	358.585.837.242,82	66,484	297.347.741.600,15	67,23	295.029.455.551,37	67,79	297.096.821.873,47	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				408.616.256.000,00		358.585.837.242,82		297.347.741.600,15		295.029.455.551,37		297.096.821.873,47		
Terlaksananya layanan jalan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (KM)		2.196,94	408.616.256.000,00	2.196,94	358.585.837.242,82	2.196,94	297.347.741.600,15	2.196,94	295.029.455.551,37	2.196,94	297.096.821.873,47		
	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)		8,5		14,59		0		20,59		14,05			
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)		0,27		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)		0,2		0,03		0		0,03		0,03			
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)		0,45		0,04		0		0,02		0			
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)		0,09		0,06		0,27		0		0,02			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)		5,53		11,03		0		16,45		12,2			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)		0		0		0		2,5		0			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)		1		0,05		0		0,05		0,05			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)		1,5		0,83		0		0,83		0,83			
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)		0,36		0,03		0		0		0			
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)		2,1		2,5		0		0,7		1			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)		12		1		1		1		1			
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)		0,2		0,06		0		0,06		0,06			
	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)		0		14,59		0		20,59		14,05			
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				9.600.000.000,00		5.000.000.000,00		0,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)		12	9.600.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	0,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survei Kondisi Jalan/Jembatan				2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survei Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (KM)		2.196,94	2.500.000.000,00	2.196,94	2.500.000.000,00	2.196,94	2.500.000.000,00	2.196,94	2.500.000.000,00	2.196,94	2.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				3.000.000.000,00		1.500.000.000,00		0,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)		1	3.000.000.000,00	0,05	1.500.000.000,00	0	0,00	0,05	1.500.000.000,00	0,05	1.500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0052 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)		8,5	200.000.000,00	14,59	200.000.000,00	0	0,00	20,59	200.000.000,00	14,05	200.000.000,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				21.000.000.000,00		30.640.415.751,16		0,00		7.989.366.052,12		10.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)		2,1	21.000.000.000,00	2,5	30.640.415.751,16	0	0,00	0,7	7.989.366.052,12	1	10.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				0,00		0,00		0,00		23.000.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	2,5	23.000.000.000,00	0	0,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				10.000.000.000,00		5.000.000.000,00		0,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)		1,5	10.000.000.000,00	0,83	5.000.000.000,00	0	0,00	0,83	5.000.000.000,00	0,83	5.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				25.000.000.000,00		10.000.000.000,00		0,00		5.000.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)		0,45	25.000.000.000,00	0,04	10.000.000.000,00	0	0,00	0,02	5.000.000.000,00	0	0,00		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)		0,27	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				58.000.000.000,00		166.428.967.288,79		0,00		246.240.089.499,25		182.377.304.113,55		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)		5,53	58.000.000.000,00	11,03	166.428.967.288,79	0	0,00	16,45	246.240.089.499,25	12,2	182.377.304.113,55		
1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)		0	0,00	14,59	100.000.000,00	0	0,00	20,59	100.000.000,00	14,05	100.000.000,00		
1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan				700.000.000,00		2.000.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)		0,2	700.000.000,00	0,03	2.000.000.000,00	0	0,00	0,03	1.000.000.000,00	0,03	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				900.000.000,00		2.000.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)		0,2	900.000.000,00	0,06	2.000.000.000,00	0	0,00	0,06	1.000.000.000,00	0,06	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				14.277.031.000,00		3.400.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)		0,36	14.277.031.000,00	0,03	3.400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				262.439.225.000,00		129.816.454.202,87		294.847.741.600,15		0,00		91.919.517.759,92		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)		0,09	262.439.225.000,00	0,06	129.816.454.202,87	0,27	294.847.741.600,15	0	0,00	0,02	91.919.517.759,92		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				4.165.000.000,00		3.098.474.435,17		2.474.925.752,54		2.544.723.014,33		2.555.367.257,97		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Bersertifikat (%)	3,43	6,39	4.165.000.000,00	7,22	3.098.474.435,17	8,06	2.474.925.752,54	8,92	2.544.723.014,33	8,92	2.555.367.257,97	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				2.590.000.000,00		1.948.474.435,17		1.374.925.752,54		1.444.723.014,33		1.455.367.257,97		
Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang bersertifikat	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	11,00	30,00	2.590.000.000,00	33,00	1.948.474.435,17	33,00	1.374.925.752,54	33,00	1.444.723.014,33	33,00	1.455.367.257,97		
	Jumlah <i>Training Need Assessment (TNA)</i> Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	0	220		55,00		55,00		55,00		55,00			
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya (Dokumen)	0	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	200		214,00		145,00		148,00		150,26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	40,00		80,00		60,00		80,00		80,00			
1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1,00	1,00	200.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00		
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				1.070.000.000,00		1.148.474.435,17		774.925.752,54		794.723.014,33		805.367.257,97		
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	200	1.070.000.000,00	214,00	1.148.474.435,17	145,00	774.925.752,54	148,00	794.723.014,33	150,26	805.367.257,97		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				100.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	40,00	100.000.000,00	80,00	200.000.000,00	60,00	150.000.000,00	80,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00		
1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				270.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	11,00	30,00	270.000.000,00	33,00	150.000.000,00	33,00	150.000.000,00	33,00	150.000.000,00	33,00	150.000.000,00		
1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				150.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya (Dokumen)	0	1,00	150.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				800.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	0	220	800.000.000,00	55,00	150.000.000,00	55,00	100.000.000,00	55,00	100.000.000,00	55,00	100.000.000,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.025.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Jumlah layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1,00	1,00	1.025.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	2,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				650.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	2,00	650.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00		
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5,00	5,00	100.000.000,00	5,00	50.000.000,00	5,00	50.000.000,00	5,00	50.000.000,00	5,00	50.000.000,00		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				275.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1,00	1,00	275.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				550.000.000,00		750.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	12	74,00	550.000.000,00	74,00	750.000.000,00	74,00	700.000.000,00	74,00	700.000.000,00	74,00	700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	12	74,00		74,00		74,00		74,00		74,00			
	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	12	74,00		74,00		74,00		74,00		74,00			
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	0	40,00		100,00		80,00		80,00		80,00			
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	12	74,00	250.000.000,00	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00		
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	12	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00		
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				100.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	0	40,00	100.000.000,00	100,00	250.000.000,00	80,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	12	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00	74,00	100.000.000,00		
1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00		

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

IV.4. Sub kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan prioritas disusun secara terarah, terukur, dan berbasis *outcome* dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum. Sub kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan implementasi program strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencakup bidang pengelolaan jalan, drainase, sumber daya air, penataan bangunan, serta infrastruktur permukiman, dengan orientasi utama pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, optimalisasi layanan publik, dan penguatan konektivitas wilayah. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan sub kegiatan prioritas ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendorong percepatan pembangunan sektor infrastruktur secara berkelanjutan. Berikut disajikan tabel sub kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain untuk pencapaian sasaran RPJMD program perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum juga mendukung pelaksanaan program prioritas (dedikasi) bupati. Adapun program dedikasi yang didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera.

Tabel IV.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kemantapan jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan jembatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten / Kota dan Desa	
				Pembangunan Jalan	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Penggantian Jembatan	
				Rehabilitasi Jembatan	
				Rekonstruksi Jalan	
				Pemeliharaan Berkala Jembatan	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Pemeliharaan Jalan Menuju Standar	
				Pembangunan Jembatan	
2	Program Pengelolaan Sumber daya air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
		yang rawan banjir	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi dan banjir rob		Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
		Meningkatnya layanan irigasi dalam kondisi baik		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Normalisasi / Restorasi Sungai	
				Peningkatan Tanggul Sungai	
				Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
				Pembangunan Tanggul Sungai	
				Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Pembangunan Bendung Irigasi	
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
				Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

IV.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta diarahkan untuk menggambarkan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum. Penetapan IKU dilakukan secara selektif, terukur, dan relevan dengan mandat organisasi, serta memperhatikan keterkaitan dengan indikator kinerja kepala daerah, indikator RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini juga berfungsi sebagai acuan utama dalam proses evaluasi kinerja perangkat daerah, baik melalui sistem SAKIP maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahunan. Dengan adanya IKU yang jelas, terukur, dan terarah, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan layanan infrastruktur yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indikator Tujuan:									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Angka	N/A	62,44	65,06	67,77	70,48	73,12	75,76	
	Indikator Sasaran:									
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Bina Marga	Angka	N/A	32,91	34,16	35,46	36,76	38,06	39,36	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Keciaptakaryaan	Angka	N/A	13,48	13,94	14,41	14,89	15,36	15,84	
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Sumber daya air	Angka	N/A	11,34	12	12,68	13,37	13,99	14,61	
5	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Bina Konstruksi	Angka	N/A	4,71	4,97	5,22	5,46	5,71	5,96	

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

IV.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Penyusunan IKK bertujuan untuk memastikan keterukuran, kejelasan arah capaian, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Keberadaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat evaluasi *obyektif* berbasis data untuk menilai sejauh mana sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Setiap IKK dirumuskan dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dan pohon kinerja perangkat daerah. Dengan adanya Indikator Kinerja Kunci yang terukur, spesifik, dan konsisten dengan sasaran strategis, perencanaan kinerja lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih terstruktur, fokus, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan infrastruktur wilayah. Selain itu, IKK berperan penting dalam mendorong tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, serta berbasis hasil (*result-based management*), sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan pelaporan kinerja secara periodik guna memperkuat akuntabilitas publik atas capaian pembangunan di sektor pekerjaan umum selama periode perencanaan berlangsung.

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab	%	17,24	26,32	29,46	32,19	35,10	37,06	39,06	
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi kewenangan Kabupaten	%	2,82	3,72	6,94	8,60	8,60	8,60	8,60	
3	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab	%	70,11	73,05	73,53	74,33	75,23	75,95	76,68	
4	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	63,20	64,12	64,41	64,70	64,70	65,16	65,62	

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025



BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan bentuk komitmen perangkat daerah dalam menerjemahkan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Dokumen Renstra ini secara sistematis merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun ke depan. Renstra ini memuat perencanaan infrastruktur adaptif yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, mitigasi bencana, dan penurunan emisi GRK daerah untuk memastikan pembangunan fisik berlangsung secara berkelanjutan.

Melalui dokumen ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara bertekad untuk:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dasar yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dinamika pembangunan nasional, kawasan, serta karakteristik lokal Kutai Kartanegara.
2. Mengoptimalkan fungsi pengendalian, pemeliharaan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna menjamin efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pemanfaatan sumber daya.
3. Mendorong penerapan inovasi teknologi di bidang pekerjaan umum, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelayanan infrastruktur publik yang andal dan responsif terhadap tantangan pembangunan ke depan.
4. Memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor baik antar perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
- b. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahunan.

- c. Kepala Dinas melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan hasil Evaluasi Renja.
- d. Evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- e. Jika berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah, maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan, menetapkan alokasi anggaran, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, Renstra Dinas Pekerjaan Umum perlu disesuaikan apabila terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan nasional, kondisi lokal, maupun dinamika lingkungan strategis, sehingga mekanisme peninjauan maupun insidental perlu dipersiapkan untuk menjaga relevansi dan keselarasan arah pembangunan infrastruktur daerah.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh jajaran perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara terarah, efektif, dan efisien dalam mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Kutai Kartanegara: "Kutai Kartanegara Idaman Terbaik". Keberhasilan implementasi dokumen ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat.

